



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PERAN PARTAI DALAM MENINGKATKAN KETERWAKILAN
PEREMPUAN PADA PEMILU LEGISLATIF 2004 DAN 2009 DI
KABUPATEN TANAH DATAR
(STUDI PADA PARTAI GOLKAR DAN PARTAI DEKMOKRAT)**

SKRIPSI



**FEBRINA ETVIL
06193038**

**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011**

ABSTRAK

FEBRINA ETVIL (06193038), Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas
Judul Skripsi: **Peran Partai Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Legislatif 2004 dan 2009 di Kabupaten Tanah Datar (Studi Pada Partai Golkar dan Partai Demokrat)** Sebagai Pembimbing I **Dr. Sri Zul Chairiyah, MA** dan Pembimbing II **Tengku Rika Valentina, S.IP, MA**. Skripsi Ini terdiri dari 84 Halaman dengan 16 referensi buku, 1 Jurnal, 3 Skripsi serta peraturan-peraturan lainnya.

Kecilnya keterwakilan politik perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Tanah Datar pada dua kali pemilu langsung tahun 2004 dan tahun 2009 menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan perempuan pada pemilu. Padahal jumlah caleg perempuan pada tahun 2009 mengalami peningkatan. Melihat kenyataan ini seharusnya keterwakilan perempuan juga ikut meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah calon perempuan yang diusulkan oleh partai politik. Sebagai organisasi politik yang mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat secara umum partai politik juga diharapkan dapat mengangkat aspirasi dan kepentingan perempuan. Dalam penelitian ini yang menjadi pertanyaan peneliti adalah bagaimana peran partai politik dalam usaha meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Tanah Datar dan apa kendala yang dihadapi oleh anggota legislatif perempuan terhadap keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Tanah Datar.

Untuk menjawab pokok permasalahan dalam skripsi ini digunakan teori peran, gender dan rekrutmen politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Proses pengumpulan data dilakukan di Kabupaten Tanah Datar khususnya di DPD partai Golkar dan DPC partai Demokrat dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Sedangkan analisis data dilakukan secara *etik* dan *emik*.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa partai politik sangat mendukung keterwakilan perempuan. Untuk meningkatkan keterwakilan perempuan partai politik telah menyediakan wadah bagi perempuan untuk ikut serta dalam ranah politik, yaitu dengan tersedianya bagian sosial dan pemberdayaan perempuan dalam struktur kepartaian. Tidak hanya itu partai juga melakukan rekrutmen politik perempuan dengan memperhatikan aspek-aspek dasar rekrutmen. Namun keterlibatan perempuan di legislatif belumlah optimal ini disebabkan adanya kendala internal berupa masalah fisik, keluarga dan kepercayaan diri perempuan. Kendala eksternal berupa ketidaksiapan laki-laki menerima perempuan sebagai mitra dan ketidaksiapan masyarakat menerima kehadiran perempuan di ranah politik.

Kata Kunci: Peran, Partai Politik, Keterwakilan Perempuan

ABSTRACT

FEBRINA ETVIL, 06193038, Department of Political Science, Faculty Social and Political Science , Andalas University Thesis title: **The Role of Party in Improving Women's Representative on 2004 and 2009 Legislatif Election in Tanah Datar Regency (A case study at Golkar an Demokrat party)** First Advisors **Dr. Sri Zul Chairiyah, MA** and Advisors II **Tengku Rika Valentina, S.IP, MA**. This thesis consists of 86 pages with 14 references to books, 1 Journal, 3 Thesis and other regulations

Minority of women political representative in legislative branch at the Tanah Datar regency which held in election on 2004 and 2009. Show that there's no improvement to ward acquirement of voice for women candidate on election. However, the amount of women candidate pn 2009 increases. Seeing this fact, the women representative should increase too along with the improvement of the amount of women candidate with proposed by their political parties. Political parties is the one and only legal political organization with can participation in election. As political organization which gives aspiration and society importance, it is hope increase the women's aspiration and importance too. So be whatever in the research are how the role of party in improving women representation in DPRD Tanah Datar regency and what the obstacle for women's in legislative concerning women's representation in legislative.

The concept in this research are role, gender and political recruitment. This research user qualitative method by using descriptive type. The data gathered at Tanah Datar residence, especially at DPD Golkar party and DPC Demokrat party by using interview, documentation technique. The informants are selected through purposive sampling technique, meanwhile the data analysis is conducted by etic and emic.

The result of this research show that political party really support the women representative. And to improve it, the political party has provide the place for women to participate in political domain, it is showed by the existence of sector for women in politic structure. Besides, the party also aspects recruitment. However the involvement of women in legislative has not been optimal yet because of internal obstacles, such as physic, family and women's bounce. On the other hand, the external obstacles such as the men's and society's hesitation in accepting women, both as partner and existence in political domain.

Key Word: Role, Political Party, Women's Representative

KATA PENGANTAR



Sembah sujudku serta puji dan syukurku kehadirat Allah SWT atas segala berkah dan rahmatNya menerima doa-doaku, harapanku untuk dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan target yang telah direncanakan. Kemudian shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya tetap di jalan yang telah di ridhoi oleh Allah SWT.

Rasa syukur tak terkira, penulis mampu menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul *“Peran Partai Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Legislatif 2004 dan 2009 Di Kabupaten Tanah Datar (Studi pada Partai Golkar dan Demokrat).”* Kewajiban untuk menyelesaikan skripsi ini menjadi pelengkap dalam masa studi perkuliahan, yang sangat membutuhkan konsentrasi dan keikhlasan untuk selalu melakukan yang terbaik.

Penulis menyadari, skripsi yang sederhana ini mungkin tidak selesai tanpa adanya bantuan dari banyak pihak, dan pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu **Dr. Sri Zul Chairiyah, MA** selaku Pembimbing I yang telah memberikan petunjuk, nasehat dan bimbingan dari awal proposal penelitian, penelitian hingga penulisan skripsi.
2. Ibu **Tengku Rika Valentina, S.IP, MA** selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan masukan-masukannya dalam skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Bapak **Drs. Syaiful, MSI** sebagai Ketua Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas.

4. Tim penguji skripsi ini yang telah memberikan masukan kepada penulis dalam mendapatkan hasil yang baik dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap staf pengajar, karyawan FISIP UNAND yang telah memberikan Ilmu yang dapat penulis aplikasikan dalam melakukan sebuah penelitian sosial sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Terima kasih untuk Ni Sil yang selalu siap sedia membantu di jurusan ilmu politik, dan juga untuk Ni Lis yang banyak membantu urusan administrasi di dekanat.
7. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan moril dan materil.
8. Seluruh rekan-rekan senasib dan seperjuangan mahasiswa Jurusan Ilmu Politik angkatan 2006, dan semua pihak yang telah ikut memberikan dorongan demi penyelesaian skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan atas semua itu dari banyak kesempatan penulis menerima saran dan support untuk selalu memberikan perubahan kearah yang lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi penulis sendiri.

Padang, April 2011

Penulis

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian.....	18
D. Signifikansi Penelitian.....	19
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Tinjauan Kepustakaan	20
1. Penelitian Tardahulu.....	20
2. Teori dan konseptual kepustakaan.....	24
a. Peran	24
b. Gender	26
c. Rekrutmen Politik.....	27
B. Skema Pemikiran dalam Penelitian	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	31
B. Lokasi (Subjek) Penelitian.....	31
C. Peranan Penelitian.....	32
D. Teknik Pemilihan Informan.....	34

E. Unit Analisis	35
F. Teknik Pengumpulan Data	35
G. Uji Pembuktian (triangulasi) Data	37
H. Analisis Data.....	37

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Partai Golongan Karya (GOLKAR)	
1. Sejarah Berdirinya Partai Golkar	40
2. Visi dan Misi Partai.....	41
3. Gambaran Umum DPD Partai Golkar Kabupaten Tanah Datar.....	44
B. Partai DEMOKRAT	
1. Sejarah Berdirinya Partai Demokrat	45
2. Visi dan Misi.....	45
3. Kondisi DPC Partai Demokrat Kabupaten Tanah Datar.....	47

BAB V TEMUAN DAN ANALISIS DATA

A. Analisis Peran Partai Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kabupaten Tanah Datar	50
1. Bentuk-bentuk peran partai Golkar dalam meningkatkan keterwakilan Perempuan	51
2. Bentuk-Bentuk Peran Partai Demokrat dalam Meningkatkan Keterwakilan perempuan	55
B. Analisis Proses Rekrutmen Perempuan yang Dilakukan Partai	59
1. Analisis proses rekrutmen perempuan yang dilakukan oleh partai Golkar.....	61
2. Analisis Proses rekrutmen perempuan yang dilakukan oleh partai Demokrat.....	67
C. Hambatan yang dihadapi oleh Anggota Legislatif Perempuan terhadap Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif di Kabupaten Tanah Datar	74
1. Kendala Internal	77

2. Kendala eksternal 80

BAB VI PENUTUP

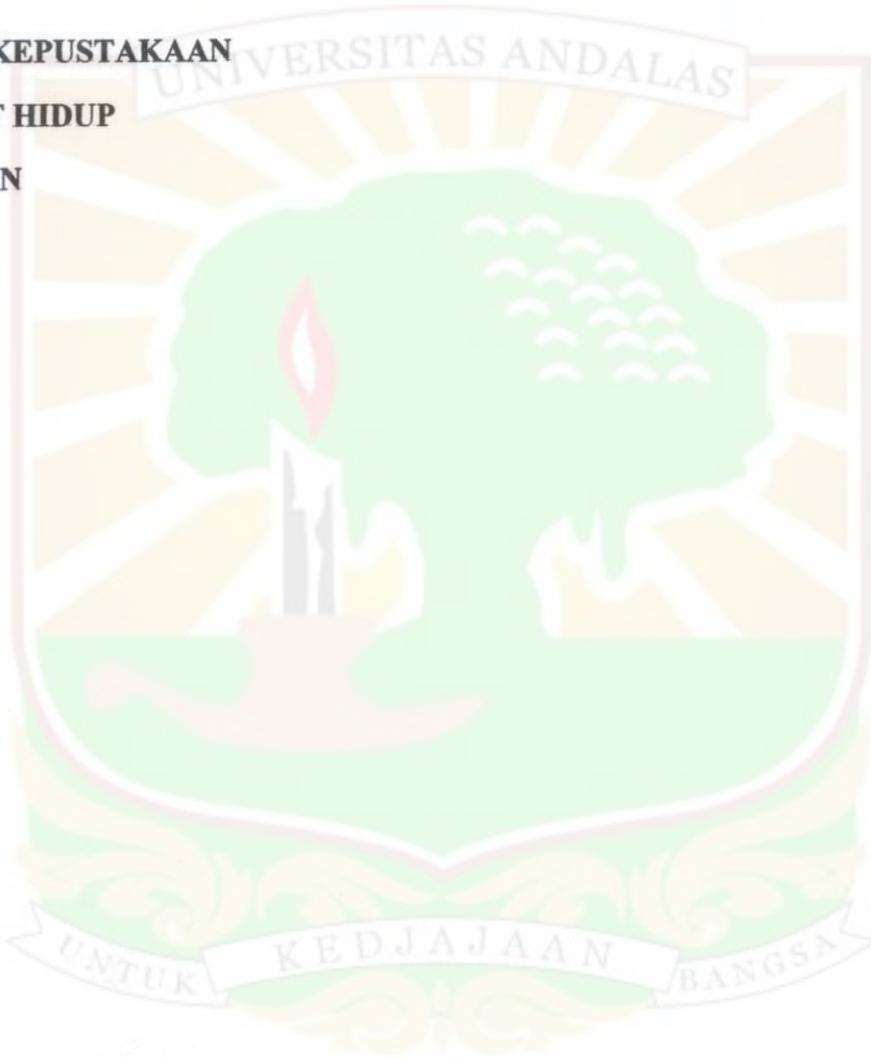
A. Kesimpulan 82

B. Saran 85

DAFTAR KEPUSTAKAAN

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keterwakilan Perempuan Indonesia dalam Lembaga Politik Formal	4
Tabel 1.2 Jumlah Calon Legislatif Perempuan DPRD Tanah Datar Peserta Pemilu 2004 dan 2009	8
Tabel 1.3 Perolehan Suara pada Pemilu Legislatif 2004	12
Tabel 1.4 Perolehan Suara pada Pemilu Legislatif 2009	13
Tabel 1.5 Perbandingan Caleg Perempuan yang Terpilih pada Pemilu Legislatif 2004 dan 2009	14
Tabel 3.1 Informan Penelitian	35
Tabel 3.2 Informan Triangulasi Data	37
Tabel 5.1 Bentuk Kegiatan yang Dilaksanakan KPPG	56
Tabel 5.2 Bentuk Kegiatan yang Dilaksanakan Bidang Pemberdayaan Perempuan Partai Demokrat.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, di negara yang menganut sistem demokrasi rakyat merupakan pemegang kekuasaan, kedaulatan berada pada tangan rakyat. Demokrasi yang kuat bersumber pada "kehendak rakyat" dan bertujuan mencapai kebaikan atau kemaslahatan bersama.¹ Dengan adanya demokrasi ini maka diharapkan adanya transparansi dalam ranah politik yang mengutamakan persoalan perwakilan kehendak rakyat yang berujung pada upaya kebebasan hak politik masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berbagai proses demokratisasi ini mulai tampak dalam kehidupan politik sebagai akibat berbagai perubahan dalam sistem pemilihan umum. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ali Murtopo, bahwa pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi². Rakyat menjadi pihak yang menentukan dalam proses politik dengan memberikan suara mereka secara langsung. Melalui pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara tidak langsung rakyat dapat melakukan pertukaran pemerintahan dengan jalan damai berdasarkan peraturan yang telah disepakati.

¹ Arifin Rahman, *Sistem Politik Indonesia dalam Perspektif Struktural Fungsional*, Surabaya: Penerbit SIG, hlm 157

² Toni Andrianus Pito Dkk, *Mengenal Teori-Teori Politik.*, Bandung: Penerbit Nuansa, 2006, hlm. 299

Indonesia sebagai negara yang menganut demokrasi, menyatakan dalam Undang-undang Dasar bahwa pemilihan umum (pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.³ Pemilihan umum merupakan wadah yang bertujuan untuk memberikan kesempatan pada masyarakat untuk menentukan siapa yang akan mewakili mereka dalam lembaga legislatif dan siapa yang akan memimpin mereka dalam lembaga eksekutif. Pemilihan umum juga wadah untuk menjaring orang-orang yang benar-benar bisa dan mampu untuk masuk ke dalam lingkaran elit politik, baik itu di tingkat daerah maupun di tingkat nasional.

Dalam rangka merealisasikan pelaksanaan Pemilu tersebut, maka diterbitkanlah Undang-undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum yang mengatur mengenai asas, pelaksanaan dan lembaga penyelenggara pemilu, peserta dan persyaratan mengikuti pemilu, serta pengaturan hak-hak untuk memilih. Selain itu, dalam ketentuan ini juga diatur mengenai jumlah kursi dan daerah pemilihan anggota DPR, penyusunan daftar pemilih dan bagaimana pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten/ Kota.⁴

Berdasarkan aturan tersebut, maka seharusnya pelaksanaan pemilu dapat berjalan secara proposional dengan mekanisme pemilihan yang baik, dimana setiap orang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk dipilih dan memilih dalam proses pemilu. Namun dengan keadaan ini, muncul pertanyaan besar mengapa masih kecilnya jumlah persentase keterwakilan perempuan dalam

³ Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Pasal 1 ayat 1

⁴ Undang-undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum

politik, apakah ada hambatan sistem dalam pelaksanaan pemilu tersebut? Atau apakah ada kaitannya dengan keterbatasan akses politik perempuan dalam kegiatan politik? atau mungkin ada hal lain yang perlu dikaji lebih lanjut dalam melihat fenomena ini.

Fenomena ini tentu menjadi menarik dan perlu untuk disoroti ketika melihat tingginya perbedaan persentase antara jumlah perempuan keseluruhan di Indonesia dengan keterlibatannya dalam ranah politik. Menurut sensus yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2000, jumlah perempuan Indonesia adalah 101.625.816 atau 51% dari seluruh populasi. Jumlah ini lebih banyak dari total jumlah penduduk di tiga negara Malaysia, Singapura dan Filipina, tetapi jumlah mayoritas tersebut tidak tampak dalam jumlah keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga pembuat/pengambil keputusan politik atau lembaga politik formal di Indonesia.⁵

Ketertarikan tentang kajian ini diperkuat lagi dengan kenyataan mayoritas perolehan suara caleg perempuan (93.28%) masih berada pada kisaran dibawah 10% dari BPP, sementara caleg laki-laki secara umum cenderung dapat melewati 10% dari BPP dari caleg perempuan (10% berbanding 5%). Artinya caleg perempuan yang dapat melewati 10% BPP hanyalah separuh dari caleg laki-laki. Semakin tinggi persentase perolehan suara dari BPP (diatas 20%), semakin sedikit caleg perempuan yang dapat memenuhinya. Lebih lanjut mengenai kecilnya keterlibatan perempuan ini dapat dilihat berdasarkan keterwakilan

⁵ Siti Hariti, *Gender and Politics*, Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana, 2009, hlm. 164

perempuan dalam lembaga politik formal seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Keterwakilan Perempuan Indonesia dalam Lembaga Politik Formal

Lembaga	Jumlah perempuan	Jumlah laki-laki	Jumlah perempuan (Persentase)
DPR	101	459	18
MA	7	40	14,8
BPK	0	7	0
DPA	2	43	4,4
KPU	2	9	18,1
GUBERNUR	1	32	3,3
BUPATI	5	331	1,5

Sumber: olahan peneliti dari berbagai sumber, tahun 2009

Berdasarkan pernyataan dan tabel diatas, jelaslah ternyata keterwakilan perempuan dalam lembaga politik formal begitu sangat rendah dibandingkan laki-laki. Memang tidak menggembarakan, disini dapat dilihat dengan jelas representasi politik perempuan di DPR hanya sekitar 18%, dari 560 anggota DPR hanya 101 orang perempuan dan dari 33 Gubernur yang ada, hanya satu orang saja Gubernur perempuan di Indonesia. Hal ini tentu menjadi kekhawatiran tersendiri bagi kaum perempuan dalam perwujudan kepentingan mereka, dimana seharusnya setiap pengambilan keputusan, baik dalam urusan pribadi hingga ke tingkat kehidupan publik senantiasa memperhatikan serta melibatkan perempuan.

Sehubungan dengan hal itu, Pemerintah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 2008-nya telah berusaha mengupayakan peningkatan intensitas keterwakilan perempuan dalam politik seperti yang tertera dalam pasal 53 sampai pasal 58 Undang-undang No. 10 Tahun 2008. Pasal tersebut menyatakan bahwa

penentuan keterwakilan calon anggota legislatif perempuan sebanyak minimal 30 persen dan dilakukan melalui *Zipper System* atau *zig zag*. Caleg perempuan ditempatkan dalam daftar caleg dengan komposisi 1 diantara 3 nama, atau setiap 3 nama yang ada terdapat 1 caleg perempuan.⁶ Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal tersebut merupakan perwujudan dari niat politik, semangat politik dan keadilan politik bangsa Indonesia terhadap kaum perempuan dan semangat untuk memajukan kaum perempuan dalam bidang politik.

Dengan adanya ketentuan ini, sebenarnya telah memberikan peluang besar bagi perempuan untuk dipilih menjadi wakil rakyat dalam pemilu. Dengan sistem *zipper*, maka perempuan akan memiliki posisi tersendiri ditengah-tengah kandidat laki-laki. Namun hal ini belumlah menjadi jaminan mutlak bagi perempuan untuk dapat terlibat secara proporsional dalam ranah politik karena masih adanya ketentuan-ketentuan lain yang mengikat untuk bisa mencapai keterwakilannya. Salah satunya adalah ketentuan sistem nomor urut ataupun suara terbanyak.

Sebelumnya dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 terutama pasal 214 telah mengatur pelaksanaan sistem pemilu dengan sistem nomor urut, namun sesuai dengan perkembangan yang ada Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan pasal tersebut.⁷ Dengan dibatalkannya Pasal 214 Undang-undang No. 10 Tahun 2008 maka penetapan caleg terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. Dengan demikian aturan penetapan calon terpilih berdasarkan nomor urut dihapuskan, dimana nomor urut terkecil bukan lagi didahulukan tetapi

⁶ Sebagaimana dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Pasal 53-58

⁷ [Http://www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id) diakses pada tanggal 23 Januari 2010

berdasarkan figuritas yang memiliki perolehan suara terbanyak. Jadi bisa saja nomor urut paling bawah terpilih jika dia mampu mengumpulkan sejumlah suara terbanyak.⁸

Pernyataan ini tentu kembali menggoyahkan keyakinan perempuan untuk bersaing dengan kandidat laki-laki dalam catur perpolitikan selain jumlahnya tidak sama (70% berbanding 30%), faktor pendukung lainnya juga kurang dimiliki oleh caleg perempuan seperti perbedaan kemampuan bersaing, pengalaman dan finansial perempuan dalam kompetisi pemilu. Maka jika penentuan calon terpilih dilakukan secara suara terbanyak, dapat dipastikan jumlah perempuan yang terpilih akan sangat berkurang. Apalagi dengan banyaknya partai politik peserta pemilu, persaingan mendapatkan kursi lebih dari satu ditiap dapil, sangatlah sulit. Dengan kata lain sistem zipper atau zig-zag sebagai upaya yang ditempuh untuk memberdayakan politik perempuan melalui *affirmative action*⁹ yang termuat dalam Pasal 214 tersebut menjadi tidak/ kurang efektif lagi.

Fenomena ini ternyata memiliki implikasi tersendiri bagi keberlangsungan keterwakilan perempuan dalam politik sampai pada tingkat daerah seperti yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar. Pada pemilu 2004 jumlah kursi di DPRD Kabupaten Tanah Datar adalah sebanyak 35 kursi dan otomatis anggota DPRD yang terpilih adalah sebanyak 35 orang dari Partai Politik. Komposisi 35 anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar yaitu laki-laki 32 orang dan perempuan 3 orang.

⁸ Astrid Anugerah, *Keterwakilan Perempuan dan Politik*, Jakarta: Pancuran Alam, 2009. hlm: 65

⁹ *Affirmative action* adalah sebuah upaya jalan keluar dari permasalahan kaum perempuan atas ketertinggalannya, dan sesuatu yang tidak mungkin dicapai berhubung sifat tanpa adanya suatu kebijakan atau tindakan khusus dalam hal mengatasi ketertinggalannya dari kaum pria.

Begitu juga yang terjadi pada saat pemilu legislatif 2009, dari 96 orang calon legislatif perempuan hanya 3 orang yang mendapatkan kursi. Ini memperlihatkan tidak adanya peningkatan keterwakilan perempuan yang duduk di legislatif. Namun disisi lain, ternyata jumlah persentase keterlibatan perempuan sebagai calon legislatif tahun 2009 malah mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari komposisi perwakilan perempuan yang diusung oleh partai politik di Kabupaten Tanah Datar. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 1.2
Jumlah Calon Legislatif Perempuan DPRD Tanah Datar
Peserta Pemilu 2004 dan 2009

No.	Nama Partai Politik	Jumlah Caleg Perempuan	
		Tahun 2004	Tahun 2009
1.	PNI Marhaenisme	1	-
2.	Partai Buruh Sosisl Demokrat	1	-
3.	PBB	2	9
4.	Partai Merdeka	6	-
5.	PPP	8	4
6.	PNUI	-	-
7.	PAN	9	11
8.	PKPB	4	-
9.	PKB	-	1
10.	PKS	10	13
11.	PDK	3	-
12.	PIB	4	-
13.	Partai Demokrat	2	10
14.	PKPI	-	-
15.	PPDI	4	1
16.	PBR	10	10
17.	PDIP	2	4
18.	Partai Golkar	10	12
19.	PSI	2	-
20.	PPD	2	-
21.	Partai Hunura	-	9
22.	PPRN	-	4
23.	Gerindra	-	4
24.	Partai Kedaulatan	-	-
25.	PDP	-	4
26.	Partai Pakar Pangan	-	4
27.	PMB	-	2
28.	Partai Republikan	-	-
29.	Partai Pelopor	-	1
30.	Partai Patriot	-	-
31.	Partai Buruh	-	-
	Jumlah	81	98

Sumber: KPU Kabupaten Tanah Datar

Partai politik menjadi suatu wadah penting dalam pemilu, partai politik merupakan sebuah organisasi yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama, tujuannya untuk mendapatkan kekuasaan serta kedudukan politik dengan cara

konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan mereka.¹⁰ Sesuai dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik untuk itu wajib bagi partai politik merekrut perempuan buat dikirim ke arena persaingan pemilu legislatif agar dipilih oleh masyarakat guna terwujudnya keterwakilan politik perempuan. Untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui *affirmative action* yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, dan Undang-undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Partai politik merupakan satu-satunya organisasi politik yang secara sah dapat ikut dalam pemilihan umum. Sebagai organisasi politik yang mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat secara umum diharapkan partai politik juga dapat mengangkat aspirasi dan kepentingan perempuan. Jika aspirasi dan kepentingan perempuan hendak ditingkatkan maka partai politik harus memasukkan isu tentang perempuan kedalam AD/ARTnya.¹¹ Interaksi perempuan dalam partai dapat dilihat bagaimana posisi perempuan dalam partai.

Untuk meningkatkan aspirasi perempuan tersebut setiap partai memasukkan isu tentang perempuan dengan adanya departemen wanita/ bidang perempuan walaupun belum semua partai yang memasukkannya dan ditempatkannya perempuan pada jabatan inti dalam kepengurusan partai. Pada kepengurusan tersebut perempuan di letakan pada posisi wakil ketua, sekretaris dan bendahara, dan sangat jarang sekali perempuan menjadi ketua

¹⁰ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm. 404

¹¹ Ani widyani soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, Jakarta: penerbit buku Kompas, 2005, hlm. 65-66.

partai. Begitu juga dalam meningkatkan keterwakilan perempuan partai politik juga melakukan perekrutan terhadap perempuan untuk ikut dalam arena pemilu.

Seperti yang terjadi pada pemilu legislatif 2009 di Kabupaten Tanah Datar, partai politik telah melaksanakan perekrutan perempuan untuk ikut dalam pemilihan umum, walaupun masih ada partai yang belum melibatkan perempuan. Dimana dalam hal ini dapat dilihat pada tabel 1.2 tahun 2009 mengalami peningkatan sebanyak 17 angka dibandingkan tahun 2004. Setidaknya hal ini memberikan gambaran baik bagi kemajuan keinginan perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia politik, walaupun masih ada partai yang tidak mengusung calon perempuan.

Peningkatan perekrutan perempuan terlihat pada Partai Golkar, yang mana di Kabupaten Tanah Datar sendiri Partai Golkar memiliki basis suara yang banyak. Untuk caleg perempuan pada pemilu 2009 Golkar mencalonkan 12 orang, ini mengalami peningkatan dari pemilu 2004 yang hanya mencalonkan 10 orang, namun dengan peningkatan tersebut Partai Golkar tidak mendapatkan kursi untuk keterwakilan perempuan di legislatif (lihat tabel 1.4), ini merupakan penurunan bagi Partai Golkar, yang sebelumnya pada pemilu 2004 2 orang caleg perempuan bisa duduk di legislatif (lihat tabel 1.3).

Partai Demokrat juga melakukan peningkatan dalam perekrutan caleg perempuan, pada pemilu tahun 2004 Partai Demokrat merupakan partai baru mencalonkan 2 orang caleg perempuan, dan pada pemilu 2009 Partai

Demokrat meningkatkan caleg perempuan menjadi 10 orang yang mana dengan peningkatan tersebut Partai Demokrat memperoleh 1 kursi bagi keterwakilan perempuan di legislatif, yang mana sebelumnya pada tahun 2004 tidak memperoleh kursi untuk keterwakilan perempuan. Hal ini dapat dilihat pada dua tabel berikut:



Tabel 1.3
Perolehan Suara pada Pemilu Legislatif 2004

NO	PARTAI	CALON TERPILIH	JK	No Urut	Perolehan Sura
1.	PARTAI GOLONGAN KARYA	MAHDELMY ST. BARBANSO	L	1	2.113
		H. NUSYIRWAN DN	L	2	2.041
		IR. ASRUL NURHASAN	L	3	1.260
		YUSMANIAR	P	1	1.243
		Z. H. DT. BAGINDO MALANO BASA	L	2	733
		YUSMEN ST.. SINARO	L	1	2.587
		Y. DT. JINDO BESAR	L	2	1.742
		IVONNE ESTHERLIE, SH	P	3	1.257
		ZULDAFRI DARMA	L	1	2.411
2.	PARTAI AMANAT NASIONAL	BUCHARI DT..TUO, SE	L	1	1.536
		MASRI FALNI, SH	L	2	438
		DRS. IRMAN MSI	L	1	1.601
		DJAMALIS ISMAIL	L	2	506
		DRS. H. MASWARDI	L	1	2.231
		DRS. ASWENDI	L	2	1.184
		ZULKIFLI BAHRI HS	L	1	1.025
		ISTAJIB, S. AG	L	2	675
3.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERAH	SAIDANI, SP	L	1	913
		MASRIL KT. SATI, SPD	L	2	1.030
		ADE RAUNAS, SE	L	1	706
		DIDATRA, S. AG	L	1	352
		FIRDAUS AGUS	L	1	1.268
4.	PARTAI BULAN BINTANG	BASRIZAL DT. R. KAYO. BASA	L	1	699
		RAMDALEL, AMD	L	1	1.361
		W.B. DT. BGD. M. N. RENTJEH	L	1	408
		KAUSARMAN, SH	L		4819
5.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	FAIZUL DT. R. MANGKUTO	L	1	934
		YUSNELLI	P	1	535
		A. A. DT. GDG. BANDARO	L	1	792
		YASMANSYAH, S. AG	L	1	1.297
6.	PARTAI BINTANG REFORMASI	DRS. A. D. DT. TAN BASA	L	1	830
		SASMITA SYAFNUR	L	1	1.224
		S. R. DT. PENGHULU SUTAN.	L	1	336
7.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	ADRIAN NURJANI, SH	L	1	1.131

Sumber: KPU Kabupaten Tanah Datar

Tabel 1.4
Perolehan Suara pada Pemilu Legislatif 2009

NO	PARTAI	CALON TERPILIH	JK	No Urut	Perolehan suara
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	ADRISON, S. Sos DT PARPATIAH	L	1	1.980
		MUHAMAD SYUKUR	L	1	793
		NIZRA HELNI. NZ	P	1	819
2	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	ALAMSUDDIN, S. Ag	L	1	1.270
		ADE RAUNAS, SE	L	2	600
		ASRIL, S. Ag	L	4	905
		FIRDAUS AGUS, SE	L	3	1.000
3	PARTAI AMANAT NASIONAL	H. BUKHARI DT. TUO, SE	L	1	1.277
		Drs. IRMAN, M.Si	L	7	1.486
		YULKUSMAYANTO, S.Si	L	1	815
		ISTAJIB, S. Ag	L	4	1.198
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	Drs. H. DAFRIZAL	L	3	2.198
		MAHDELMI DT. BARBANSO	L	1	1.936
		JUNAIDI DT. RAJO MANGKUTO	L	7	1.812
		H. Y. DT SARINDO NAN PUTIH	L	1	833
		ELIZAR	L	1	2.190
		ABDUL WAZID DT. INDO MANGKUTO	L	2	1.270
		Dr. YUNTRI TURA EBSYAR	L	10	1.255
		ZULDAFRI DARMA	L	1	2.094
		Drs. HENDRI. N, MM	L	2	975
5	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	AFWANDI KATIK PARMATO, S. Ag	L	1	923
		YUSNELLI	P	2	758
		YASMANSYAH, S. Ag	L	2	1.293
		AMIGO RINALDI DT. PENGHULU SUTAN	L	6	1.164
6	PARTAI BULAN BINTANG	DEDI ADMOND, S. Sos	L	1	882
		YON LIZA	L	1	1.955
7	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	ADRIAN NURJANI, SH	L	1	1.202
8	PARTAI BINTANG REFORMASI	KADIMAN DT. SIMARAJA NAN KAYO	L	1	1.729
		SASMITA SYAFNUR	L	1	932
9	PARTAI DEMOKRAT	SYAFRIL, SH	L	1	1.645
		ERNA	P	5	880
		NURHAMDI ZAHARI	L	1	1.779
		ERI HENDRI, SP	L	1	1.451
		REFLIS	L	3	1.085
		BAHRUNSYAH	L	1	1.062

Sumber: KPU Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan pada dua tabel tersebut, dapat dikatakan bahwa masih minimnya keterwakilan perempuan dalam lembaga politik di Kabupaten Tanah Datar. Perempuan hanya mendapat persentase yang sangat kecil dalam kursi parlemen dan itupun juga dengan persentase perolehan suara terkecil jika dibandingkan dengan perolehan suara dari kandidat laki-laki, walaupun jumlah pemilih perempuannya lebih banyak dari pada pemilih laki-laki.

Dan pada tabel berikut dapat kita lihat dengan jelas kecilnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dan adanya penurunan keterwakilan perempuan bagi partai di parlemen.

Tabel 1.5
Perbandingan Caleg Perempuan yang Terpilih
pada Pemilu Legislatif 2004 dan 2009

No	Partai Politik	Jumlah Caleg Perempuan		Caleg Terpilih					
		2004	2009	Tahun 2004			Tahun 2009		
				Nama	No. Urut	Perolehan Suara	nama	No. Urut	Perolehan Suara
1	Partai Golkar	10	12	Yusmaniar	1	1.243	-	-	-
				Ivone Estherlie. SH	3	1.257	-	-	-
2	PPP	8	4	Yusneli	1	535	Yusneli	2	758
3	Partai Hanura	-	9				Nirza Helni. NZ	1	819
4	Partai Demokrat	2	10				Erna	5	880

Sumber: KPU Kabupten Tanah Datar Tahun 2009

Selain itu perolehan suara perempuan yang didapat pada saat pemilu ini sangat kecil dibandingkan dengan suara yang didapat oleh laki-laki. Dengan perolehan suara perempuan yang kecil membuat keterwakilan perempuan di legislatif menjadi sangat rendah dan belum bisa dikatakan proporsional. Dengan

kata lain, walaupun telah adanya Undang-undang No. 2 Tahun 2008 dan Undang-undang No 10 Tahun 2008 yang mengatur keterwakilan politik perempuan dan berbagai upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk meningkatkan kuantitas perempuan dalam parlemen, tetap saja jumlah suara caleg perempuan dan komposisinya di parlemen masih tergolong kecil.

Maka atas dasar inilah peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian. Peneliti mencoba melihat bagaimana peran partai dan perempuan partai dalam meningkatkan keterwakilan perempuan pada pemilu 2009 di Kabupaten Tanah Datar.

B. RUMUSAN MASALAH

Affirmative action merupakan tindakan strategis yang harus diambil sebagai tindakan khusus bersifat sementara untuk mempercepat peningkatan representasi perempuan dalam politik. Pentingnya kebijakan affirmative bagi perempuan didasari kenyataan bahwa keterwakilan politik perempuan Indonesia (baik tingkat nasional maupun tingkat lokal) masih sangat rendah yaitu 18 persen di kursi DPR dan 5,2 persen di kursi DPRD provinsi serta angka yang lebih rendah lagi di tingkat Kabupaten/ Kotamadya.¹²

Pentingnya kajian tentang keterwakilan perempuan di parlemen ini karena keberadaan perempuan dibidang politik merupakan bentuk eksistensi perempuan dalam rangka memperjuangkan kepentingan perempuan khususnya,

¹² <http://www.Komunitas Sekitarkita » Affirmative Action.htm> diakses pada tanggal 30 Agustus 2010

dan umat dan bangsa umumnya. Kesadaran akan pentingnya politik perempuan semakin nyata dengan semakin terkuaknya sejumlah persoalan yang menimpa perempuan mulai dari masalah kekerasan terhadap perempuan, kesehatan reproduksi, trafficking dan sebagainya. Persoalan perempuan juga membutuhkan kebijakan politik yang melahirkan sejumlah aturan untuk mengatasi persoalan perempuan.

Kecilnya keterwakilan politik perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Tanah Datar pada dua kali pemilu langsung 2004 dan 2009 yang diselenggarakan menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan terhadap perolehan suara caleg perempuan pada pemilu. Walaupun jumlah caleg perempuan pada tahun 2009 telah mengalami peningkatan. Melihat kenyataan ini seharusnya keterwakilan perempuan juga ikut meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah calon perempuan yang diusulkan oleh partai politik.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka kecilnya persentase keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Tanah Datar memperlihatkan proses lobby, bergaining posison, hingga perjuangan perempuan berhadapan dengan kebijakan internal partai sangat berpengaruh terhadap peningkatan keterwakilan politik perempuan.

Kurang tercapainya target 30 persen wakil perempuan di legislatif disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya adanya anggapan bahwa ketidakmampuan perempuan untuk berkiprah dalam dunia politik, rendahnya

kualitas perempuan, budaya patriarki yang telah lama mengakar di masyarakat dan penafsiran agama yang menghasilkan kondisi yang bias gender.¹³

Selain itu kurang tercapai keterwakilan 30% dipengaruhi oleh proses seleksi dalam partai politik. Seleksi terhadap para kandidat biasanya dilakukan oleh sekelompok kecil pejabat atau pimpinan partai, yang hampir selalu laki-laki. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, di mana kesadaran mengenai kesetaraan gender dan keadilan masih rendah, pemimpin laki-laki dari partai-partai politik mempunyai pengaruh yang tidak proporsional terhadap politik partai, khususnya dalam hal gender. Perempuan tidak memperoleh banyak dukungan dari partai-partai politik karena struktur kepemimpinannya didominasi oleh kaum laki-laki. Seperti yang tercantum dalam Undang-undang Pemilu No 12 tahun 2003 pasal 65 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap partai politik dapat mengajukan sekurangnya 30% keterwakilan perempuan.¹⁴ Namun pada kenyataan pada pemilu legislatif 2009 di Kabupaten Tanah Datar masih ada partai politik yang tidak mengajukan caleg perempuan.

Berdasarkan uraian diatas terlihat jelas bahwa kendala terbesar dalam usaha peningkatan partisipasi politik perempuan sebagai anggota legislatif parlemen adalah interaksi perempuan dengan partai politik. Untuk itu kajian yang mendalam tentang sistem, platform, program kerja, mekanisme pengambilan keputusan dan sistem pengelolaan organisasi perlu yang berpihak pada perempuan

¹³http://www.khofifahindarparawangsa.com/nsroom/artikel/hambatan_terhadap_partisipasi_politik_perempuan_diIndonesia.pdf, diakses pada tanggal 23 Januari 2010.

¹⁴ Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Pasal 65 ayat 1

sangat menentukan apakah parpol tersebut berperan aktif dalam usaha meningkatkan keterwakilan perempuan atau hanya sekedar *lip service* saja.

Selain itu berbagai usaha perempuan partai sebagai kandidat dalam pemilu 2004 dan 2009, serta melakukan aliansi-aliansi dengan berbagai pihak dengan LSM perempuan juga menjadi penentu keberhasilan perempuan peningkatan persentase keterwakilan perempuan. Maka dari itu, peneliti terdorong untuk mencari jawaban dari pertanyaan berikut:

1. Bagaimana peran partai politik dalam usaha meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Tanah Datar?
2. Apa hambatan yang dihadapi oleh anggota legislatif perempuan terhadap keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif Kabupaten Tanah Datar?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis :

- 1 Peran partai politik dalam usaha meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Tanah Datar
- 2 Hambatan yang dihadapi anggota legisltif perempuan terhadap keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif Kabupaten Tanah Datar

D. SIGNIFIKASI PENELITIAN

1. Secara akademis penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi perkembangan keilmuan khususnya bagi mahasiswa ilmu politik dan sebagai masukan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan dalam bidang politik terutama mengenai keterwakilan perempuan.



BAB II

KERANGKA TEORI

Kerangka teori disini melihat penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu ada beberapa penelitian terdahulu yang telah meneliti tentang keterwakilan perempuan. Peneliti bertujuan mereview peneliti terdahulu sebagai acuan dan perbandingan dengan penelitian yang dilakukan peneliti sendiri.

Fokus utama dari penelitian yang dilakukan penelitian ini adalah bagaimana peran partai dan perempuan partai dalam meningkatkan keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif 2009. Untuk menjawab dan memudahkan peneliti menganalisis permasalahan tersebut, maka peneliti menggunakan beberapa teori dan konsep yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pada penelitian ini peneliti menggunakan konsep budaya patriarki dan ideologi gender, sosialisasi dan partisipasi politik, partai politik dan sistem perwakilan rekrutmen caleg perempuan. Dalam kerangka teori ini peneliti akan memaparkan beberapa teori menurut para ahli. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teori menurut para ahli yang relevan dan mempermudah peneliti dalam menganalisis permasalahan penelitian.

A. Tinjauan Kepustakaan

1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian tentang keterwakilan perempuan di Parlemen adalah salah penelitian yang pada saat sekarang ini banyak dibicarakan, terlebih pada kalangan

aktivis perempuan itu sendiri. Dalam hal ini, peneliti bermaksud melihat kembali penelitian terdahulu sebagai bentuk acuan dan perbandingan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Khofifah Indar Parawansa dalam jurnal, dengan judul penelitian "Hambatan terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia".¹⁵

Penelitian ini mendeskripsikan bahwa kurangnya keterwakilan perempuan di parlemen disebabkan oleh serangkaian hambatan yang membatasi kemajuan mereka. Oleh karena itu, berbagai strategi harus dipelajari secara simultan untuk mengatasi hambatan tersebut, sehingga tujuan untuk meningkatkan representasi perempuan di parlemen bisa diwujudkan. Studi kasus ini menyajikan tingkat representasi politik perempuan di Indonesia, dan mengkaji beberapa dari hambatan yang menghalangi wanita untuk menjadi anggota parlemen. Selain itu, ditawarkan berbagai strategi yang bisa dipertimbangkan untuk mengatasi permasalahan keterwakilan ini.

Dalam hal ini peneliti mencari penyebab dari masalah yang menghalangi perempuan menjadi anggota parlemen, yaitu: Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola seleksi antara laki-laki dan perempuan sebagai anggota legislatif. Faktor pertama berhubungan dengan konteks budaya di Indonesia yang masih sangat kental asas patriarkalnya. Persepsi yang sering dipegang adalah

¹⁵http://www.khofifahindarparawangsa.com/nsroom/artikel/hambatan_terhadap_partisipasi_politik_perempuan_diIndonesia.pdf, diakses pada tanggal 23 Januari 2010

bahwa arena politik adalah untuk laki-laki, dan bahwa tidaklah pantas bagi wanita untuk menjadi anggota parlemen. Faktor kedua berhubungan dengan proses seleksi dalam partai politik. Seleksi terhadap para kandidat biasanya dilakukan oleh sekelompok kecil pejabat atau pimpinan partai, yang hampir selalu laki-laki. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, di mana kesadaran mengenai kesetaraan gender dan keadilan masih rendah, pemimpin laki-laki dari partai-partai politik mempunyai pengaruh yang tidak proporsional terhadap politik partai, khususnya dalam hal gender. Perempuan tidak memperoleh banyak dukungan dari partai-partai politik karena struktur kepemimpinannya didominasi oleh kaum laki-laki. Ketiga, berhubungan dengan media yang berperan penting dalam membangun opini publik mengenai pentingnya representasi perempuan dalam parlemen. Keempat, tidak adanya jaringan antara organisasi massa, LSM dan partai-partai politik untuk memperjuangkan representasi perempuan. Jaringan organisasi-organisasi wanita di Indonesia baru mulai memainkan peranan penting sejak tahun 1999.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Yuni Susilawati, 05193091, Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Andalas Padang, dengan judul Keterwakilan Politik Perempuan di DPRD kota Padang Periode 2009-2014, Pasca Pembatalan Penetapan Calon Terpilih berdasarkan Nomor Urut dalam Undang-undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 (Yuni Susilawati, 2009). Penelitian ini berangkat dari pembatalan Pasal 214 Undang-undang Pemilu, yang mana untuk mewujudkan keterwakilan politik perempuan dikeluarkan serangkaian kebijakan afirmatif. Kebijakan afirmatif terwujud dalam sistem

pemilu proporsional terbuka yang diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilu anggota DPR, DPD, DPRD dalam Pasal 53, 55, 214. Dan dengan dibatalkannya pasal 214 tersebut maka peluang afirmatif action keterwakilan perempuan menjadi diminimalisir.

Permasalahan yang dibahas oleh peneliti tersebut diatas adalah bagaimana konsistensi partai politik pemenang pemilu legislatif daerah kota Padang 2009 dalam menindaklanjuti afirmatif action tentang keterwakilan politik perempuan dan bagaimana keterwakilan politik perempuan dari partai politik pemenang pemilu legislatif daerah di DPRD kota Padang 2009 pasca pembatalan pasal 214 Undang-undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa parpol yang paling konsisten dapat diurutkan mulai dari PDI-P, PPP, Partai Golkar dan PPP, PKS, Gerindra, Hanura, PAN dan Partai Demokrat. Adapun keterwakilan politik perempuan mengalami penurunan kuantitas pasca dibatalkannya pasal 214 Undang-undang Pemilu No. 10 Tahun 2008 dibandingkan jika tetap menggunakan pasal 214 UU Pemilu No. 10 Tahun 2008.

Dari dua penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti melihat masih ada kelemahan dari penelitian diatas. Dari penelitian yang dilakukan oleh Khofifah Indar Parawansah, penulis menemukan kelemahan dari penelitian ini yaitu dalam penelitian ini tidak adanya penerapan teori yang dipakai oleh peneliti guna untuk membahas permasalahan yang diteliti. Dan pada penelitian yang dilakukan oleh Yuni Susilawati, dalam pembahasan masalah peneliti lebih banyak dengan menggunakan undang-undang

tentang pemilu, dan lebih banyak berbicara tentang hukum dan tidak begitu mendalam membahas dengan teori keterwakilan yang digunakannya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep affirmative action dan Partai politik, dan mencoba memperjelas dengan menggabungkan pandangan dari beberapa orang ahli yang dianggap tepat dalam pemaparan konsep tersebut.

Dibanding dengan penelitian terdahulu, penelitian yang dilakukan peneliti tidak hanya melihat gambaran keterwakilan politik perempuan yang rendah akibat dibatalkannya pasal 214 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 saja, akan tetapi disini peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana peran partai dalam meningkatkan keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif 2009. Yang mana dalam menganalisis dan mendeskripsikan fenomena peneliti akan menggunakan teori yang relevan sebagai pisau analisis, sehingga nantinya peneliti akan menemukan bagaimana peran parpol dalam meningkatkan keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif 2009.

2. Teori dan Konseptual Kepustakaan

a. Peran

Parson, sebagaimana yang dikutip oleh Doyle Paul Jhonson mengemukakan bahwa peranan merupakan harapan-harapan atau tindakan yang diharapkan oleh seseorang. Dengan adanya status atau kedudukan seseorang dalam masyarakat, maka itu akan menimbulkan harapan-harapan dalam masyarakat akan sebuah peranan.¹⁶

¹⁶ Doyle Paul johnson, *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*, Jakarta: PT Gramedia, 1986, hlm. 123.

Parson juga membagi peranan atas dua dimensi yaitu hak dan kewajiban. Tindakan yang diharapkan dan dilaksanakan oleh seseorang merupakan tanggung jawab serta kewajiban sedangkan tindakan/respon orang lain merupakan hak. Parson menghubungkan peran dan status. Dengan kata lain status menunjukkan pada posisi seseorang dalam suatu hubungan interaksi.¹⁷

Peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri sebagai suatu proses peranan mencakup tiga hal, yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-paraturan yang membimbing.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dan masyarakat organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹⁸

Jadi peranan dari seseorang mengacu kepada kedudukan dan fungsi yang dimiliki dalam masyarakat dalam bentuk perilaku atau tindakan yang memiliki pengaruh dalam sistem. Rocher sebagaimana yang dikutip Parson mengemukakan suatu fungsi adalah kumpulan kegiatan yang ditujukan kearah pemenuhan kebutuhan sistem.¹⁹ Seseorang akan berperan apabila sudah menjalankan fungsinya sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya. Dan bagaimanapun juga

¹⁷ *Ibid.*,123

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Garfindo Persada, 1990, hlm 243-244

¹⁹ George Ritzer Dan Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Kencana, hlm 124

suatu peranan tidak dapat terlepas dari lingkungan atau masyarakat, karena pelaksanaan peran adalah hak dari masyarakat yang harus dipenuhi.

Parson menggunakan peran-status sebagai unit dasar dari sebuah sistem. Ia memandang konsep status peran sebagai komponen atau bagian struktural dalam sebuah sistem. Sistem mengacu pada posisi struktural dalam sebuah sistem sosial, dan peran adalah apa yang dilakukan oleh aktor dalam posisinya itu.²⁰

b. Gender

Menurut Webster *new wolrd dictionary* tahun 1984, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku, sementara menurut *women's studie encyclopedia* tahun 1990, gender adalah konsep budaya yang berusaha membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.²¹

H. T. Wilson dalam *Sex and Gender* mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan pengaruh faktor budaya dan kehidupan kolektif dalam membedakan laki-laki dan perempuan. Sejalan dengan pendapat yang dikutip Showalter yang mengartikan gender lebih dari sekedar perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya, tetapi menekankan gender sebagai konsep analisa dalam mana kita dapat menggunakannya untuk menjelaskan sesuatu.²²

²⁰ *Ibid.*,

²¹ Sarwono Kusumaatmadja, *Politik Dan Perempuan*, Depok: KOEKOESAN, 2007, hlm 91

²² <http://Media.Isnet.org/islam/paramadina/jurnal/5kaki.html#108>

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Gender dalam arti ini adalah suatu bentuk rekayasa masyarakat (social constructions), bukannya sesuatu yang bersifat kodrati.

Gender bukanlah kodrat ataupun ketentuan Tuhan. Oleh karena itu gender berkaitan dengan proses keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang terstruktur, ketentuan sosial dan budaya ditempat mereka berada. Dengan demikian gender dapat dikatakan pembedaan peran, fungsi, tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dibentuk/dikonstruksi oleh sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman.

c. Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik pada hakikatnya adalah proses penempatan tokoh-tokoh pada posisi tertentu. Pemilihan dan pengangkatan tokoh-tokoh politik adalah suatu transformasi seleksi terhadap anggota masyarakat untuk menempati peranan khusus dalam suatu sistem politik. Budiarto mengatakan bahwa rekrutmen politik adalah proses dimana partai mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik.²³ Sementara itu Surbakti menjelaskan pengertian rekrutmen politik adalah seleksi pengangkatan seseorang

²³ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm: 404

atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.²⁴

Dari berbagai definisi tentang rekrutmen politik tersebut dapat disimpulkan bahwa rekrutmen politik adalah cara untuk meraih orang-orang dari berbagai kalangan yang dianggap mampu untuk berperan dalam proses politik dan sekaligus salah satu cara untuk menyeleksi calon-calon pemimpin yang berkualitas. Rekrutmen politik dalam pengertiannya secara khusus dapat diartikan sebagai suatu proses dimana individu-individu diseleksi untuk menjalankan peranan-peranan politik dalam pemerintahan melalui kriteria-kriteria.

Dalam melakukan rekrutmen politik hendaknya partai memperhatikan aspek dasar yang digunakan sebagai standar melakukan rekrutmen, adapun standar sebagai aspek pengukuran kualifikasi rekrutmen adalah²⁵:

1. Moralitas

Ini menyangkut track record seseorang yang akan dicalonkan apakah pernah tersangkut dengan tindakan-tindakan yang menjadi aib di hadapan publik, misalnya terkait kasus kriminal, korupsi dan sebagainya.

2. Akseptabilitas

Partai menciptakan mekanisme untuk menunjukkan bahwa seorang calon harus dapat diterima oleh masyarakat karena telah melayani masyarakat. Akseptabilitas ini bisa ditunjukkan melalui bentuk rekomendasi atau dukungan dari arus bawah.

²⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 2010, hlm. 150.

²⁵ Modul Program Pasca Sarjana Politik Lokal dan Otonomi Daerah, *Konsep Parpol, Pemilu dan Parlemen*, Universitas Gajah Mada, 2006, hlm. 10

3. Kapabilitas

Kapabilitas bisa ditunjukkan melalui ukuran-ukuran pendidikan atau keahlian terkait dengan posisi yang dipromosikan. Ukuran yang dipergunakan bisa saja tidak hanya berpatokan pada ukuran formalitas, seperti ijazah tingkat pendidikan, namun juga ukuran kepekaan sosial.

4. Pluralisme

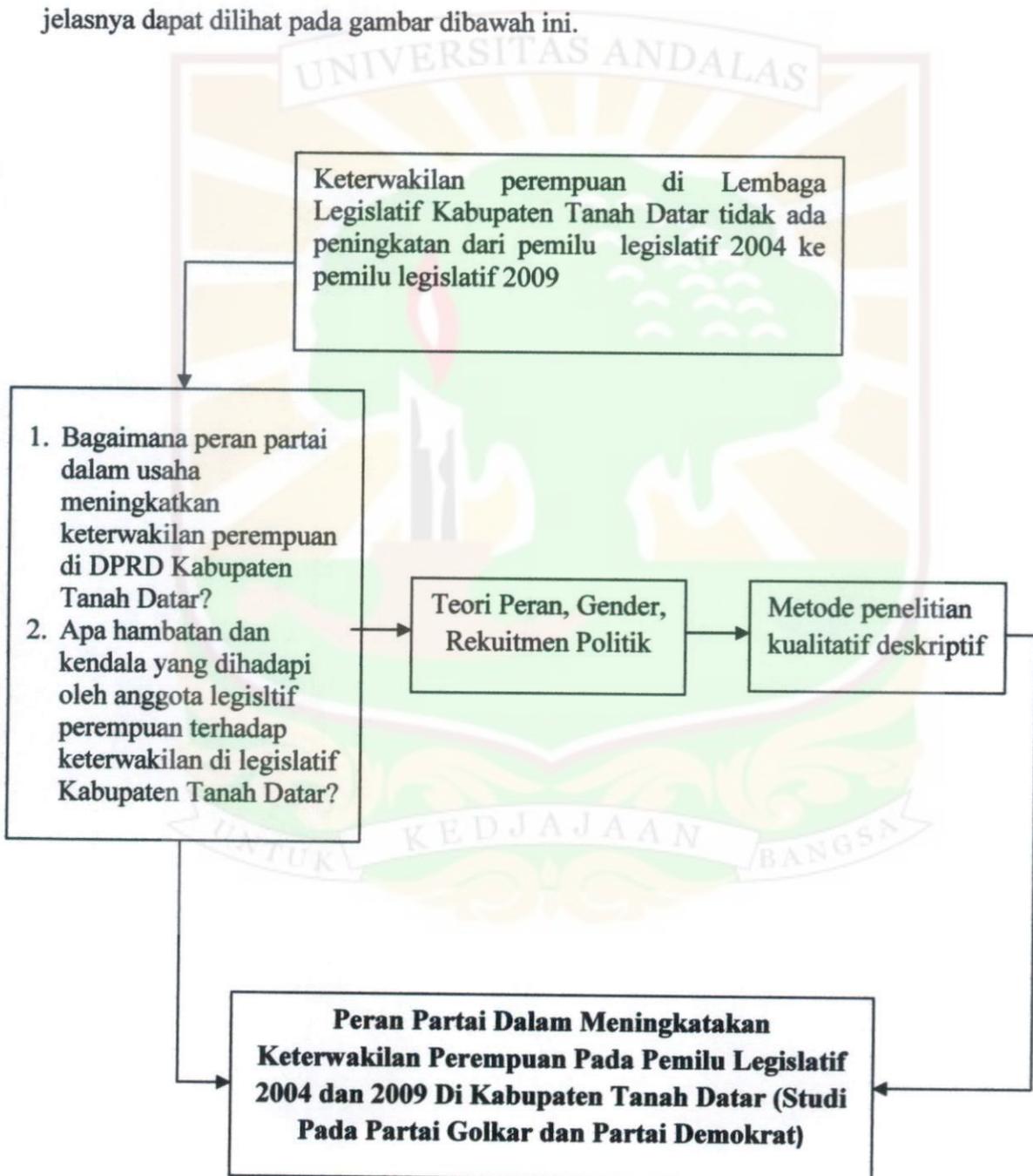
Partai perlu menunjang pluralisme sehingga membuka kemungkinan mempromosikan calon-calon yang berbeda identitas sosialnya (lintas agama, etnis dan sebagainya). Yang harus dijunjung adalah apakah kesiapan calon menjalankan amanat partai sebagai amanat masyarakat.

5. Gender

Partai mempertimbangkan dan menciptakan instrumen intervensi agar perempuan lebih bisa mendapatkan ruang untuk terlibat dalam pencalonan. Ini berguna untuk memperkuat tautan terhadap regulasi partai politik maupun pemilu untuk lebih tegas terhadap komitmen keterlibatan perempuan.

B. Skema Pemikiran Penelitian

Pada setiap penelitian, selalu menggunakan kerangka pemikiran sebagai alur dalam menentukan arah penelitian. Hal ini menghindari terjadinya perluasan pembahasan yang menjadikan penelitian tidak terarah/terfokus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Bodgan dan Taylor mendefenisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁶

Jenis penelitian merupakan penelitian deskriptif, karena data-data yang didapat dilapangan berupa data-data hasil wawancara, pengamatan (observasi) dan dokumentasi yang berisikan fakta yang didapat dari informan dilapangan tentang peran partai politik dalam meningkatkan keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif 2004 dan 2009 di Kabupaten Tanah Datar.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan di Kabupaten Tanah Datar, tepatnya penelitian ini dilakukan di DPC Partai Golkar dan Partai Demokrat. Pemilihan lokasi di daerah ini didasarkan pada tempat terjadinya fenomena serta merupakan tempat yang menurut peneliti akan mempermudah didapatkannya data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Alasan lain dari pemilihan Kabupaten Tanah Datar sebagai lokasi penelitian adalah sesuai dengan judul

²⁶ Lexy Maleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006, hlm. 4

penelitian peneliti yaitu peran partai dalam meningkatkan keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif 2004 dan 2009, perolehan suara caleg perempuan tidak mengalami peningkatan dari pemilu legislatif 2004, hanya 3 orang anggota legislatif perempuan yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Tanah Datar, selain itu adanya partai politik yang mengalami penurunan dalam keterwakilan perempuan.

C. Peranan Peneliti

Dengan pendekatan kualitatif ini, peranan peneliti dalam penelitian ini menjadi sangat dominan karena peneliti berperan sebagai instrumen utama. Peran peneliti dalam penelitian pada dasarnya merupakan perencana, pengumpul data, analis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya sendiri.²⁷

Peneliti secara teknis mulai melakukan penelitian setelah dikeluarkannya surat penelitian dari kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol) nomor 070/515/KBPLM/2010 pada tanggal 14 Desember 2010. Peneliti terjun ke lapangan dengan mempersiapkan data wawancara yang disesuaikan dengan tujuan penelitian untuk menjawab permasalahan penelitian. Dikarenakan penelitian ini memiliki dua macam tujuan penelitian, maka peneliti memfokuskan untuk melengkapi data pada pertanyaan penelitian.

Dengan mengantongi surat izin dari kantor Kesbang Pol dan Limnas pada hari rabu tanggal 15 desember 2010 peneliti mendatangi kantor DPC Partai Demokrat, disana peneliti bertemu dengan bapak Mardaus Metha yang mana

²⁷*Ibid.*, hlm 168

merupakan wakil ketua bidang agama, sosial dan budaya. Peneliti menyampaikan maksud kedatangan peneliti, dan pada saat itu peneliti meminta keterangan keberadaan ketua DPC Partai Demokrat, dan beliau memberitahu bahwa bapak ketua sedang berada di Jakarta dalam waktu yang tidak ditentukan. Setelah beberapa saat berbincang, akhirnya peneliti meminta bapak Mardaus Metha untuk diwawancara.

Setelah melakukan wawancara dengan bapak Mardaus Metha, peneliti meminta informasi tentang ibu Erna yang merupakan anggota legislatif dari partai Demokrat periode 2009-2014 yang merupakan informan penelitian ini. Dengan Ibu Erna peneliti berjanji bertemu pada hari senin tanggal 20 desember 2010 DPRD, karena pada saat itu Ibu Erna sedang berada di luar kota.

Masih pada hari rabu itu peneliti pergi mendatangi sekretariat DPD Partai Golkar, namun sesampai disana peneliti menemukan kantor dalam keadaan kosong. Dan pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2010 peneliti kembali mendatangi kantor DPD Golkar, disana peneliti bertemu dengan sekretaris Partai Golkar Bapak Anton Yondra, dan menyampaikan maksud dan keperluan peneliti untuk wawancara dengan Ketua Partai dan Perempuan Partai Golkar yaitu bapak Zulfadri Darma, Ibu Ivone Esterli dan Ibu Nurhayati.

Pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010 di Kantor DPRD Kabupaten Tanah Datar peneliti mewawancarai Bapak Zulfadri Darma yang merupakan ketua DPD Partai Golkar, dilanjutkan dengan DPC Demokrat untuk mewawancarai Ibu Erna. Dan pada hari itu peneliti melanjutkan dengan mewawancarai ibu Nurhayati di sekretariat DPD Partai Golkar.

Pada tanggal 22 Desember 2010, peneliti mendatangi sekretariat Partai Golkar, pada hari tersebut peneliti berjanji dengan Ibu Ivone Esterli untuk melakukan wawancara pada jam 10.00 pagi tapi diundur sampai 2 jam karena Ibu Ivone ada pertemuan.

Peneliti menemui kesulitan untuk melakukan janji wawancara dengan salah seorang caleg perempuan dari Partai Demokrat. Hal ini disebabkan informan tersebut sibuk dan jarang ke kantor. Dan setelah menunggu satu minggu lamanya, akhirnya peneliti dapat melakukan janji wawancara dengan Ibu Donna. Setelah terjun ke lapangan, peranan peneliti selanjutnya adalah menganalisa hasil temuan di lapangan sesuai dengan pertanyaan peneliti dan memberikan kesimpulan-kesimpulan penelitian.

D. Teknik Pemilihan Informan

Menurut Moleong informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian, dipilih sesuai dengan kepentingan permasalahan dan tujuan penelitian. Untuk memilih informan bagi penelitian ini lebih tepat dengan cara sengaja (*purposive sampling*), maksudnya peneliti sendiri yang menentukan informan penelitiannya sebagai sumber data berdasarkan asumsi bahwa informan tersebut mempunyai karakteristik yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini informan yang dipilih adalah orang-orang yang terlibat dalam fenomena penelitian, yaitu

Tabel 3.1
Pemilihan Informan

No	Informan Penelitian	Nama	Jabatan di partai	Keterangan
1.	Pimpinan Partai Politik	Zudafri Darma	Ketua DPC Partai Golkar Kab. Tanah Datar	Ketua DPRD Kab. Tanah Datar periode 2009-2014
		Mardaus metha	Wakil Ketua DPC Partai Demokrat	-
2.	Perempuan partai yang pernah/menjadi anggota legislatif	Ivone Estherlie. SH	Bendahara Partai Golkar	Perempuan partai Golkar yang pernah menjadi anggota legislatif periode 2004-2009
		Erna	-	Perempuan partai demokrat yang menjadi anggota legislatif periode 2009-2014
3.	Perempuan partai yang menjadi calon legislatif pada pemilu legislatif 2009	Nurhayati	Wakil sekretari bidang PP wilayah IV	Calon Legislatif Partai Golkar
		Dra. Donna	Wakil ketua bidang pemberdayaan perempuan	Calon legislatif partai Demokrat

E. Unit Analisis

Dalam penelitian ini, yang menjadi unit analisis adalah lembaga. Pada unit analisis ini subjek penelitian harus berkaitan dengan lembaga yang terkait dengan masalah penelitian. Jadi unit analisis dari penelitian ini adalah pemimpin partai dan perempuan partai, yaitu perempuan yang menjadi anggota partai.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik yaitu :

1. Wawancara mendalam (in depth interview)

Merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan cara tatap muka langsung dengan informan. Wawancara adalah

proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu: pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan kepada orang yang diwawancarai (interviewee). wawancara ini, dilaksanakan sewaktu penelitian di lapangan untuk memperoleh data primer, melalui orang-orang yang terkait dengan permasalahan yang dimaksud.²⁸ Wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam (*in-dept interview*) yang dilakukan secara intensif dan berulang-ulang kepada informan. Hal ini bertujuan agar peneliti mampu mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti.

2. Dokumentasi

Dengan memakai teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi bukan hanya dari narasumber/informan, tetapi peneliti bisa memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis atau dari dokumen yang ada pada informan.²⁹ Untuk lebih menguatkan data-data yang telah diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang mendalam, juga diperlukan data-data sekunder dimana data diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini serta dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang penting dan relevan dengan penelitian ini.

²⁸ Afrizal. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif: dari Pengertian Sampai Penulisan Laporan*, Padang: laboratorium sosiologi FISIP Unand, 2005, hlm. 155

²⁹ Djama'an Satori. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009. Hlm. 184

G. Uji Pembuktian (Triangulasi) Data

Dalam penelitian ini untuk menguji keabsahan data digunakan triangulasi yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.

Dalam hal acuan untuk keperluan triangulasi dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi dilakukan terhadap peran yang dilakukan partai politik dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Tanah Datar. Informan yang dipilih untuk proses triangulasi adalah caleg perempuan yang yang tidak mendapatkan kursi di lembaga legislatif.

Tabel 3.2 Informan Triangulasi Penelitian

No.	Caleg dari Partai	Nama Informan
1.	Partai Golongan Karya	a. Kuswardini Wardas b. Yusmaniar
2.	Partai Demokrat	a. Laili Amnas b. Leri Fransiska

H. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan secara etik dan emik. Analisis data *etik* yaitu peneliti menggunakan konsep-konsep yang telah dibangun oleh ahli untuk menjelaskan sesuatu. Sedangkan analisa data *emik* adalah peneliti menggunakan konsep-konsep yang digunakan oleh informan penelitian untuk menjelaskan

sesuatu, dengan kata lain peneliti menggunakan konsep lokal. Berdasarkan penjelasan diatas, analisis data dalam penelitian berarti peneliti melakukan konseptualisasi data dan mencari hubungan antara konsep ketika menulis laporan.³⁰

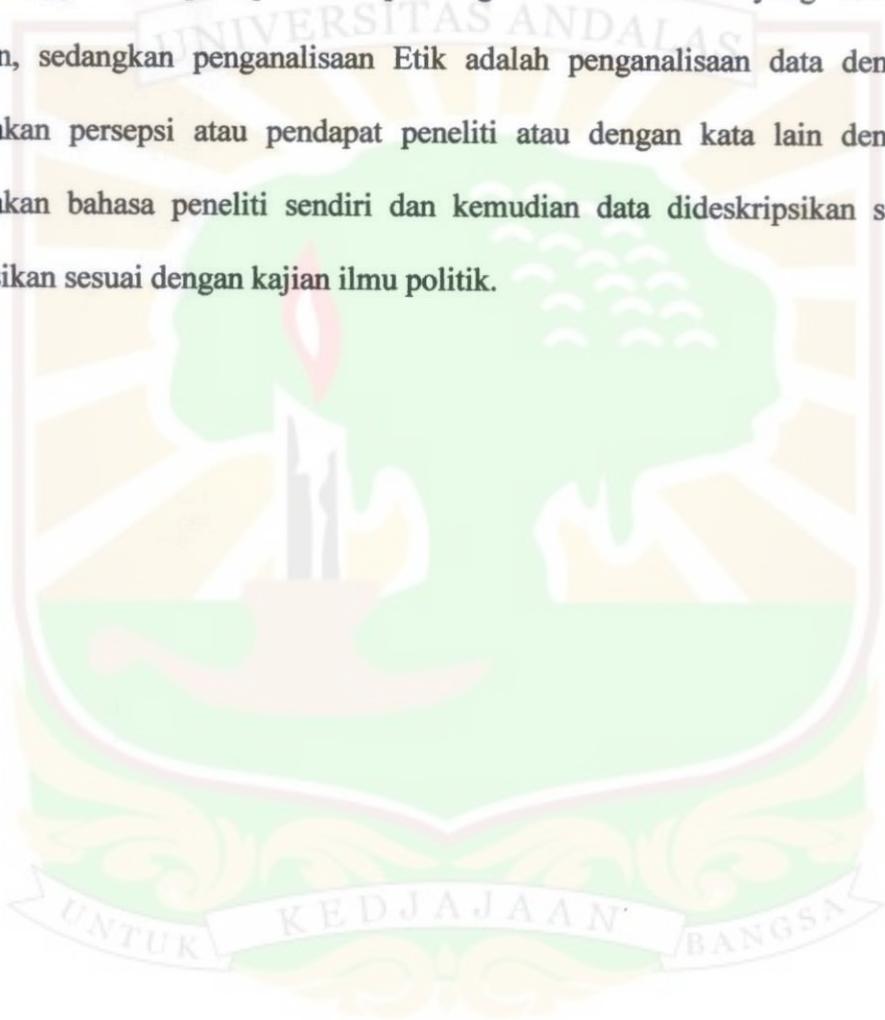
Peneliti memilih untuk menggunakan analisis data emik dan etik ini karena penulis berusaha mengurangi kesubjektifitasan penulisan nantinya, karena data yang diperoleh dari orang diluar peneliti akan lebih akurat dari pada data yang diperoleh dari persepsi peneliti sendiri. Sehingga kevalidtan data lebih bisa terjaga.

Data yang didapat dalam penelitian ini adalah berupa gambaran peran partai dalam meningkatkan keterwakilan perempuan pada Lembaga Legislatif Kabupaten Tanah Datar. Data yang didapat dari hasil observasi, wawancara dan dokumen yang relevan dengan kajian ini, ditelaah dan kemudian dilakukan penganalisaan secara Emik dan Etik. Penganalisaan data secara Emik adalah penganalisaan data dengan menggunakan persepsi atau pandangan dari informan yang ditemui dilapangan, sedangkan penganalisaan Etik adalah penganalisaan data dengan menggunakan persepsi atau pendapat peneliti atau dengan kata lain dengan menggunakan bahasa peneliti sendiri dan kemudian data dideskripsikan serta dielaborasikan sesuai dengan kajian ilmu politik.

Data yang didapat dalam penelitian ini adalah bentuk peran partai politik dalam meningkatkan keterwakilan perempuan, proses rekrutmen perempuan yang dilakukan oleh partai serta hambatan yang dialami oleh anggota legislatif

³⁰ Afrizal, op.cit.,hlm. 60-61

perempuan terhadap keterwakilan perempuan di lembag legislatif Kabupaten Tanah Datar. Data yang didapat dari hasil observasi, wawancara dan dokumen yang relevan dengan kajian ini, ditelaah dan kemudian dilakukan penganalisaan secara Emik dan Etik. Penganalisaan data secara Emik adalah penganalisaan data dengan menggunakan persepsi atau pandangan dari informan yang ditemui dilapangan, sedangkan penganalisaan Etik adalah penganalisaan data dengan menggunakan persepsi atau pendapat peneliti atau dengan kata lain dengan menggunakan bahasa peneliti sendiri dan kemudian data dideskripsikan serta dielaborasikan sesuai dengan kajian ilmu politik.



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Partai Golongan Karya (GOLKAR)

1. Sejarah Berdirinya Golkar

Dengan menyadari bahwa pertumbuhan dan perkembangan masyarakat karya dan kekaryaannya sesungguhnya sudah ada dan lahir dalam suasana yang bersamaan dengan proklamasi 17 Agustus 1945, namun akibat perkembangan kehidupan sosial politik di Indonesia, masyarakat karya dan kekaryaannya belum sempat menghimpun dan mengorganisir diri dalam satu wadah yang merupakan sarana untuk mengabdikan karya dan kekaryaannya guna pembangunan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu tanggal 20 Oktober 1964 masyarakat karya dan kekaryaannya menghimpun diri dalam wadah organisasi politik yang bernama Sekretariat Bersama Golongan Karya.³¹

Indonesia pada masa reformasi telah melahirkan berbagai arus demokratisasi, seperti kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan politik, termasuk kebebasan mendirikan partai, keterbukaan informasi serta penegakan supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Dilandasi dengan semangat reformasi tersebut, Golongan Karya melakukan perubahan paradigma serta menegaskan dirinya sebagai partai politik pada Rapat Pimpinan

³¹ Sejarah Partai Golkar, didownload pada tanggal 3 Januari 2010 melalui situs [www.http://indonesia.ghobro.com/2009/05/sejarah-partai-golkar.html](http://indonesia.ghobro.com/2009/05/sejarah-partai-golkar.html)

Paripurna Golongan Karya tanggal 19 Oktober 1998 dan dideklarasikan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 1999, dengan nama Partai Golongan Karya.³²

2. Visi dan Misi Partai

Visi Partai Golkar

Partai Golkar berjuang demi terwujudnya Indonesia baru yang maju, modern, bersatu, adil, dan makmur dengan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, berakhlak baik, menjunjung tinggi hak asasi manusia, cinta tanah air, demokratis, dan adil dalam tatanan masyarakat madani yang mandiri, terbuka, egaliter, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja dan semangat kekaryaannya serta disiplin yang tinggi.

Dengan visi ini maka Partai Golkar hendak mewujudkan kehidupan politik nasional yang demokratis melalui pelaksanaan agenda-agenda reformasi politik yang diarahkan untuk melakukan serangkaian koreksi terencana, melembaga dan berkesinambungan terhadap seluruh bidang kehidupan.

Keterbukaan adalah nilai kemanusiaan hakiki yang merupakan nafas dari gerakan reformasi. Atas dasar pandangan keterbukaan tersebut, kita harus menciptakan sistem sosial politik yang terbuka dan transparan dengan struktur dan proses politik yang dapat secara efektif benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat.

Untuk itu maka peluang bagi rakyat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam proses-proses politik mutlak dibuka seluas-luasnya. Kebebasan untuk berserikat,

³² Buku saku anggota Partai Golkar 2004-2009.

berkumpul dan menyampaikan pendapat semakin terjamin dan dilindungi oleh Undang-undang. Sendi utama masyarakat madani adalah supremasi hukum.

Di bidang ekonomilah visi Partai Golkar adalah ekonomi rakyat atau kerakyatan atas dasar keyakinan bahwa hanya sistem perekonomian inilah yang menjamin rakyat makin sejahtera. Pembangunan ekonomi dalam paradigma lama yang terlampau menekan pertumbuhan dengan tulang punggung konglomerasi ternyata justru membawa negara dan bangsa Indonesia terjerembab kedalam krisis ekonomi yang sangat parah. Konglomerasi semu dan sangat rapuh terhadap guncangan ekonomi global. Dalam konteks ini, maka paradigma ekonomi kerakyatan justru memiliki potensi yang sangat kuat bagi penguatan fundamental ekonomi bangsa.

Dibidang sosial budaya, Partai Golkar mencita-citakan penguatan budaya bangsa yang mampu melahirkan budaya yang kuat, yakni bangsa yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi atau keterampilan, memiliki etos kerja yang tinggi, memiliki disiplin sosial yang tangguh dan memiliki etika yang kuat. Untuk menuju terciptanya bangsa yang kuat seperti itu, maka perlu dikembangkan suasana dan iklim yang mendukung bagi berkembangnya budaya ilmu (etos intelektualisme), budaya kerja (etos kerja), budaya disiplin, dan budaya hidup etis dan religius di kalangan masyarakat.

Misi Partai Golkar

Dalam rangka mengaktualisasikan doktrin dan mewujudkan visi tersebut Partai Golkar dengan ini menegaskan misi perjuangannya, yaitu: menegakkan, mengamalkan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa demi memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mewujudkan cita-cita proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang untuk mewujudkan masyarakat demokratis, menegakkan supremasi hukum, mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan hak-hak asasi manusia. Dalam rangka membawa misi mulia tersebut Partai Golkar melaksanakan fungsi-fungsi sebagai sebuah partai politik modern, yaitu³³:

- I. Mempertegas komitmen untuk menyerap, memadukan, mengartikulasikan, dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan rakyat sehingga menjadi kebijakan politik yang bersifat publik.
- II. Melakukan rekrutmen kader-kader yang berkualitas melalui sistem prestasi (merit system) untuk dapat dipilih oleh rakyat menduduki posisi-posisi politik atau jabatan-jabatan publik. Dengan posisi atau jabatan politik ini maka para kader dapat mengontrol dan mempengaruhi jalannya pemerintah untuk diabdikan sepenuhnya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

³³ Hasil Munas VIII Partai Golkar tahun 2009, *Suara Golkar Suara Rakyat*, Sekretariat Jendral Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar tahun 2009, hlm. 3

- III. Meningkatkan proses pendidikan dan komunikasi politik yang dialogis dan partisipatif, yaitu membuka diri terhadap berbagai pikiran, aspirasi dan kritik dari masyarakat.

3. Gambaran Umum DPD Partai Golkar Kabupaten Tanah Datar

DPD Partai Golkar Kabupaten Tanah Datar berkantor di Jalan Ketumanggungan No. 32 Batusangkar merupakan partai pemenang pada pemilu 2004 dan 2009. Perolehan suara Partai Golkar Kabupaten Tanah Datar pada pemilu 2004 adalah 49.002 suara, dan jumlah suara ini mengantarkan Partai Golkar meraih 10 kursi di DPRD Kabupaten Tanah Datar yang diantaranya terdapat 2 kursi yang diduduki oleh perempuan. Sedangkan pada pemilu 2009 Partai Golkar hanya 35.348 suara dan tidak ada caleg perempuan yang duduk di DPRD Kabupaten Tanah Datar.³⁴

Dalam bidang perempuan Partai Golkar memuat adanya bidang khusus perempuan yaitu bidang perempuan, kesehatan dan lingkungan, yang mana dalam bidang tersebut adanya pemberdayaan terhadap perempuan. Selain itu untuk meningkatkan keterwakilan politik perempuan Partai Golkar mempunyai organisasi sayap yaitu KKPG (Kesatuan Perempuan Partai Golkar). Namun dalam kepengurusan harian Partai Golkar belum memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Walaupun begitu Partai Golkar tetap mendukung keterwakilan perempuan.

DPD Partai Golkar Kabupaten Tanah Datar ketua oleh Zulfadri Darma masa bakti 2009-2015 berdasarkan Keputusan DPD Partai Golkar Propinsi

³⁴ KPU kabupaten Tanah Datar tahun 2004 dan 2009

Sumatera Barat Nomor: KEP-016/4/GKSB/3/2010 tanggal 31 Maret 2010 (Dalam Lampiran 8).

B. Partai Demokrat

1. Sejarah Berdirinya Partai Demokrat

Partai Demokrat dirintis dan didirikan oleh 99 orang tokoh, dimotori oleh Menkopolkam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tanggal 9 september 2001. Partai ini dideklarsikan oleh 29 ketua DPD dari seluruh Indonesia di Jakarta Covention Center. Menjelang pemilu tahun 2004, DPD Partai Demokrat sudah ada di 32 propinsi dan DPC di 416 kabupaten. Tidak heran jika Partai Demokrat adalah partai dengan tingkat verifikasi faktual paling tinggi. Partai tersebut lolos di 26 propinsi yang direkomendasikan untuk diverifikasi faktual.³⁵

Idealisme partai ini adalah demokrasi, kesejahteraan dan keamanan sekaligus menjadi trilogi perjuangan partai. Partai ini mengembangkan wawasan nasionalisme, humanisme, dan internasionalisme. Agenda nasional yang diusung adalah recovery ekonomi nasional, reformasi, dan rekonsiliasi.³⁶

2. Visi dan Misi Partai

Visi Partai

Partai Demokrat bersama masyarakat luas berperan mewujudkan keinginan luhur rakyat Indonesia agar mencapai pencerahan dalam kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, menjunjung

³⁵ Situs Resmi Partai Demokrat, <http://www.demokrat.or.id/sejarah-demokrat> diakses pada tanggal 25 Desember 2010

³⁶ AD/ART Partai Demokrat

tinggi semangat nasionalisme, humanisme, dan internasionalisme, atas dasar ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam tatanan duni baru yang damai, demokratis dan sejahtera.

Misi Partai

1. Memberikan garis yang jelas agar partai berfungsi secara optimal dengan peranan yang signifikan di dalam seluruh proses pembangunan Indonesia baru yang dijiwai oleh semangat reformasi serta pembaharuan dalam semua bidang kehidupan masyarakat, kebangsaan dan kenegaraan kedalam formasi semula sebagaimana telah diikrarkan oleh para pejuang, pendiri pencetus Proklamasi kemerdekaan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan titik berat kepada upaya mewujudkan perdamaian, demokrasi (Kedaulatan rakyat) dan kesejahteraan.
2. Meneruskan perjuangan bangsa dengan semangat kebangsaan baru dalam melanjutkan dan merevisi strategi pembangunan nasional sebagai tumpuan sejarah sbahwa kehadiran Partai Demokrat adalah melanjutkan perjuangan generasi-generasi sebelumnya yang telah aktif sepanjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sejak melawan penjajah merebut kemerdekaan, mnerumuskan Pancasila dan UUD 1945, mengisi kemerdekaan secara berkesinambungan hingga memasuki era reformasi.
3. Memperjuangkan tegaknya persamaan hak dan kewajiban warga negara tanpa membedakan ras, agama, suku dan golongan dalam

rangka menciptakan masyarakat sipil yang kuat, otonomi daerah yang luas serta terwujudnya representasi kedaulatan rakyat pada struktur lembaga perwakilan dan permusyawarahan.³⁷

3. Kondisi DPC Partai Demokrat Kabupaten Tanah Datar

DPC Partai Demokrat Kabupaten Tanah Datar berkantor di Jalan Sutan Alam Bagagarsyah No 182 Batusangkar. Pada pemilu legislatif 2004 Partai Demokrat hanya memperoleh 2.069 suara, dengan jumlah perolehan suara tersebut jelas Partai Demokrat tidak mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Tanah Datar. walaupun demikian pada pemilu legislatif 2009 Partai Demokrat memperlihatkan peningkatan yang sangat besar dengan perolehan suara 23.993, dengan jumlah perolehan suara tersebut mengantarkan Partai Demokrat sebagai pemenang pemilu pada peringkat dua di Kabupaten Tanah Datar, dan 6 orang caleg mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Tanah Datar periode 2009-2014, salah satu diantaranya adalah perempuan.

Dalam meningkatkan keterwakilan politik perempuan Partai Demokrat sangat mendukung, ini dapat terlihat dengan adanya bidang khusus perempuan yaitu pemberdayaan perempuan meskipun belum banyak kegiatan perempuan yang berjalan maksimal. Selain itu dapat juga dilihat pada struktur pengurus harian keterwakilan perempuan belum terpenuhi 30%, seperti yang tecantum dalam undang-undang.

DPD Partai Demokrat Kabupaten Tanah Datar masa bakti 2008-2010 diketuai oleh Efendi Amir berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat

³⁷ AD/ART Partai Demokrat

Partai Demokrat Nomor : 166/SK/DPC/DPP.PD/SB/IV/2008 pada tanggal 30
April 2008 (Dalam Lampiran 9)



BAB V

Peran Partai Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Legislatif 2004 Dan 2009 Di Kabupaten Tanah Datar

Dalam bab ini akan dikemukakan hasil temuan data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara dengan informan dan dokumentasi berupa laporan-laporan yang berkaitan dengan peran partai dalam meningkatkan keterwakilan perempuan.

Partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan dari partai politik ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional.³⁸ Partai politik merupakan sarana bagi warga Negara untuk turut serta atau partisipasi dalam proses pengelolaan Negara.

Partai politik merupakan satu-satunya organisasi politik yang secara sah yang dapat ikut dalam pemilihan umum. Sebagai organisasi politik yang mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat secara umum diharapkan partai politik juga dapat mengangkat aspirasi dan kepentingan perempuan.

Pentingnya kajian tentang keterwakilan perempuan ini karena keberadaan perempuan dibidang politik merupakan eksistensi perempuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan khususnya, dan umat dan bangsa umumnya. Kesadaran akan pentingnya politik perempuan semakin nyata dengan terkuaknya sejumlah persoalan yang menimpa perempuan mulai dari masalah kekerasan terhadap perempuan, kesehatan reproduksi, trafficking dan sebagainya.

³⁸ Meriam Budiarjo, Op.Cit, hlm 404

Persoalan perempuan juga membutuhkan kebijakan politik yang melahirkan sejumlah aturan untuk mengatasi persoalan perempuan.

Maka dalam penelitian ini peneliti akan memaparkan dan menganalisis temuan data yang peneliti dapat dari lapangan, yang mana peneliti akan menganalisis dua temuan yaitu: Yang pertama, peneliti akan menganalisis peran partai dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Tanah Datar, untuk melihat peran partai dalam meningkatkan keterwakilan perempuan tersebut peneliti lihat dari analisis bentuk- bentuk peran partai dalam meningkatkan keterwakilan perempuan yang dilakukan oleh Parta Golkar dan Partai Demokrat Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya peran partai tersebut dilihat dari rekrutmen perempuan yang dilakukan oleh Partai Golkar dan Partai Demokrat Kabupaten Tanah Datar.

Temuan kedua dalam penelitian ini adalah Analisis hambatan dan kendala aktivis perempuan partai di legislatif Kabupaten Tanah Datar dalam meningkatkan keterwakilan perempuan. Hambatan dan kendala yang dibahas disini dibagi menjadi dua yaitu hambatan internal dan eksternal yang dialami oleh aktivis perempuan partai.

A. Analisis Peran Partai Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kabupaten Tanah Datar

Peran partai politik dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen adalah sebagai bentuk dari pelaksanaan fungsinya, sebagai mana yang dikemukakan oleh Parson bahwa peran adalah wujud pelaksanaan fungsi sesuai dengan status yang dimiliki, berupa serangkaian tindakan dan perilaku. Untuk

mencapai keterwakilan perempuan di Partai dan parlemen maka partai perlu menyediakan wadah untuk perempuan. Sesuai dengan fungsi partai sebagai penyerap, penghimpun, penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara. Dengan demikian partai perlu menyediakan wadah-wadah untuk perempuan beraspirasi.

Di Kabupaten Tanah Datar sendiri keterwakilan perempuan masih sangat rendah, baik itu keterwakilan di partai maupun di lembaga legislatif. Ini dapat dilihat dari komposisi perempuan yang ada di partai dan di lembaga legislatif, yang mana ketentuan kuota 30% masih jauh dari yang diinginkan. Oleh karena itu perlu peran partai dalam meningkatkan keterwakilan perempuan. Seperti yang dilakukan oleh Partai Golkar dan Partai Demokrat Kabupaten Tanah Datar.

1. Bentuk-Bentuk Peran Partai Golkar Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan

Partai Golkar sangat mendukung adanya keterwakilan perempuan di partai dan di lembaga legislatif, seperti yang disampaikan oleh Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tanah Datar berikut:

"...adanya urgensi keterlibatan perempuan atau adanya keterwakilan perempuan dalam partai atau lembaga legislatif disebabkan ada hal-hal pemerintah yang berkaitan langsung dengan perempuan. Sebagai orang yang mengalaminya jadi sangat tepat kalau perempuan itu sendiri langsung ikut serta dalam membuat perumusan dan memutuskannya..."³⁹

³⁹ wawancara dengan ketua DPD partai Golkar Kabupaten Tanah Datar, Zuldafri Darma, pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010 pukul 11.00 wib kantor DPRD Kabupaten Tanah Datar

Dari pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa keterlibatan perempuan di partai dan legislatif dianggap suatu yang sangat penting, mengingat adanya kebutuhan-kebutuhan khusus perempuan di dalam masyarakat, yang hanya dapat dipahami oleh perempuan secara optimal itu sendiri, misalnya masalah kesejahteraan keluarga, kesehatan reproduksi dan anak, kekerasan seksual, dan sebagainya. Sehingga dengan keterlibatan perempuan dalam partai maupun sampai ketingkat legislatif dapat memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi terpenuhinya kebutuhan kaum perempuan itu sendiri.

Dengan adanya ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pencalonan anggota legislatif yang tercantum dalam undang-undang akan mempermudah partai untuk merekrut kader-kader perempuan, karena dengan adanya aturan demikian animo perempuan untuk terjun ke politik akan tinggi. Tapi pada kenyataannya partai politik masih kesulitan dalam merekrut kader perempuan. seperti yang disampaikan ketua DPD Partai Golkar Tanah Datar

"...seluruh partai politik pada dasar sangat mendukung adanya keterwakilan perempuan apalagi dengan adanya ketentuan minimal 30% keterwakilan perempuan tapi masalahnya keinginan perempuan itu sangat rendah, kader partai sulit untuk mencari kader perempuan untuk duduk di kepengurusan partai...."⁴⁰

Hal serupa juga disampaikan oleh salah seorang perempuan partai dari pengurus Partai Golkar.

"... sebenarnya partai sangat welcome dengan adanya keterwakilan perempuan, seperti yang tercantum dalam undang-undang yaitu adanya ketentuan minimal 30%

⁴⁰ Wawancara dengan ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tanah Datar, Zulfadri Darma, pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010 pukul 11.00 wib kantor DPRD Kabupaten Tanah Datar

keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai, tapi kenyataannya ketentuan tersebut belum sampai angka 30%, penyebabnya diantaranya perempuan itu sendiri sulit diajak masuk dalam organisasi politik....”⁴¹

Dari pernyataan tersebut jelas dilihat bahwa partai Golkar sangat mendukung dengan keterwakilan perempuan, tapi perempuannya sendiri yang belum ada kemauan untuk ikut serta dalam politik, hal ini disebabkan oleh berbagai hal diantaranya masih ada perempuan yang beranggapan bahwa dunia politik itu kotor dan merupakan bidang laki-laki, dan alasan lain yang menjadi penyebab dari sulitnya perempuan ikut dalam kegiatan politik adalah masalah cara kerja dan waktu kerjanya partai yang bisa kapan saja, seperti yang dikemukakan Ivonne Esterlie:

”...perempuan masih beranggapan bahwa politik itu kotor, politik tidak cocok dengan perempuan kemudian jamnya partai tidak sama dengan jam kerja yang dianggap cocok dengan perempuan seperti jadi guru, pegawai negeri, jamnya partai bisa kapan saja...”⁴²

Untuk mengatasi ketidakterarikan perempuan dalam bidang politik maka partai berusaha melakukan usaha-usaha untuk memudahhi perempuan agar dapat berkecimpung dalam partai. Usaha-usaha yang dilakukan partai adalah dengan memberi ruang khusus kepada perempuan untuk mengeluarkan aspirasinya, seperti dengan adanya bidang-bidang perempuan dalam kepengurusan partai.

⁴¹ wawancara dengan perempuan partai DPD Partai Golkar Kabupaten Tanah Datar, Ivonne Esterlie, pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2010 pukul 12.00 wib kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Tanah Datar

⁴² Wawancara dengan perempuan partai DPD Partai Golkar Kabupaten Tanah Datar, Ivonne Esterlie, pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2010 pukul 12.00 wib kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Tanah Datar

Selain itu partai juga tidak membatasi perempuan hanya pada bidang perempuan saja, partai juga memberikan kesempatan pada perempuan untuk ikut serta dalam bidang lainnya, selama perempuan tersebut mampu. Hal ini didukung dengan pernyataan ketua DPD Partai Golkar sebagai berikut:

"...dalam partai Golkar sendiri adanya organisasi sayap khusus bidang perempuan, yang berada langsung pada bidang perempuan, kesehatan, dan lingkungan hidup yaitu KPPG (Kesatuan Perempuan Partai Golkar) merupakan wadah perempuan dimana kegiatan-kegiatan perempuan berlangsung di organisasi ini, begitu juga usaha partai untuk menyiapkan kader perempuan untuk menghadapi pemilu, melalui KPPG perempuan dipersiapkan untuk maju ke legislatif, yaitu dengan mengadakan pelatihan-pelatihan kepemimpinan dan adanya pendidikan politik bagi perempuan selain itu partai selalu melakukan perimbangan dalam kepengurusan, tidak hanya dibidang perempuan saja perempuan ditempat tapi dibidang-bidang lain sesuai dengan kemampuannya, pada, pada intinya partai tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki..."⁴³

Hal ini dibenarkan oleh oleh kader perempuan partai Golkar yang juga merupakan caleg pada pemilu 2009

"... adanya KPPG (Kesatuan Perempuan Partai Golkar) sebagai wadah perempuan sangat menguntungkan bagi perempuan itu sendiri untuk mengeluarkan aspirasinya, dan melalui organisasi ini perempuan dapat berhubungan langsung dengan masyarakat dengan kegiatan-kegiatan khas perempuan, tapi tidak hanya itu kami perempuan juga melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan yang sifatnya menambah wawasan..."⁴⁴

⁴³Wawancara dengan ketua DPD partai Golkar Kabupaten Tanah Datar, Zulfadri Darma, pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010 pukul 11.00 wib kantor DPRD Kabupaten Tanah Datar

⁴⁴Wawancara dengan perempuan partai DPD Partai Golkar Kabupaten Tanah Datar, Nurhayati, pada tanggal 20 Desember 2010 pada 13.00 wib kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Tanah Datar

Mengenai hal ini Kuswardini Wardas menambahkan bahwa:

*"...program yang dijalankan selain kaderisasi juga memasukan program kesetaraan dan keadilan gender untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, dalam kegiatan-kegiatan pelatihan yang kami ikuti banyak membahas tentang masalah-masalah perempuan dan pemahaman terhadap sistem pemilu, agar kami perempuan siap untuk menghadapi pemilu, khususnya bagi perempuan yang menjadi caleg..."*⁴⁵

Dalam mendukung keterwakilan perempuan partai Golkar telah menyediakan wadah untuk berekspresi bagi perempuan, yaitu adanya departemen perempuan, dan di dalam departemen perempuan ini partai Golkar memiliki organisasi sayap yang diberi nama KPPG (Kesatuan Perempuan Partai Golkar) yang dalam organisasi sayap ini perempuan diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan perempuan, seperti mengadakan diskusi-diskusi masalah khusus yang dihadapi perempuan dalam melaksanakan aktivitas partai.

Selain itu fungsi dari bidang perempuan KPPG ini adalah untuk menyiapkan perempuan ikut serta dalam pemilu baik itu sebagai pemilih maupun menjadi yang dipilih. Perempuan diberikan pelatihan-pelatihan kepemimpinan, tentang sistem pemilu, kampanye dan berhubungan dengan media massa. Usaha lain yang dilakukan partai yaitu menjalin jaringan kerja sama untuk mendukung kandidat perempuan dalam pemilu dan anggota legislatif perempuan yang terpilih. Berikut kegiatan-kegiatan yang dilakukan KPPG (Kesatuan Perempuan Partai Golkar):

⁴⁵Wawancara dengan perempuan partai DPD Partai Golkar Kabupaten Tanah Datar yang pernah menjadi Caleg pada pemilu legislatif 2009, Kuswardini Wardas, pada hari Senin tanggal 5 April 2011 pukul 12.00 wib kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Tanah Datar

Tabel 5.1
Bentuk Kegiatan yang Dilaksanakan KPPG

No	Bentuk Kegiatan	Tujuan Kegiatan
1.	Pelatihan- pelatihan : a. Pelatihan kepemimpinan b. Pengenalan terhadap sistem pemilu	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan ditujukan kepada perempuan, agar perempuan dapat mengetahui selukbeluk kepemimpinan, selain itu pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya yang ada pada diri perempuan, seperti menimbulkan rasa percaya diri dalam diri perempuan itu sendiri. - Mempersiapkan perempuan untuk menghadapi pemilu, baik itu untuk memilih dan dipilih.
2.	Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain seperti dengan orgainsasi dan media massa	- perempuan melaksanakan kegiatan tidak hanya dalam linkup partai saja, tapi juga ada kegiatan di luar partai yang melibatkan pihak lain untuk mendukung kegiatan.

Sumber: Hasil Wawancara dengan Kepengurusan KPPG

2. Bentuk-Bentuk Peran Partai Demokrat Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan

Tidak jauh berbeda dengan Partai Golkar, Partai Demokrat juga sangat mendukung dengan adanya keterwakilan perempuan, hal ini disampaikan oleh oleh Wakil ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Tanah Datar berikut ini :

"...partai sangat mendukung dengan adanya keterwakilan perempuan baik di Partai maupun di Lembaga legislatif, karena perempuan dan laki-laki memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengurus masalah yang ada di masyarakat, dan ada hal-hal yang memang perempuan yang harus mengerjakannya dan begitu sebaliknya..."⁴⁶

Partai Demokrat sangat mendukung adanya keterlibatan perempuan di ranah politik, baik di partai maupun di lembaga legisltif. Keterlibatan perempuan

⁴⁶ Wawancara dengan wakil ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Tanah Datar, Mardaus Metha, pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 pukul 10.00 wib kantor DPC Partai Demokrat Kabupaten Tanah Datar

di ranah politik sangat diperlukan karena tidak semua hal dapat dikerjakan oleh laki-laki. Laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengurus masalah yang ada di masyarakat. Dengan keterlibatan perempuan dalam ranah politik dapat memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi kepentingan kaum perempuan.

Pada Partai Demokrat sendiri keterwakilan perempuan masih belum dapat dikatakan membanggakan, keterlibatan perempuan di partai Demokrat sendiri masih jauh dari angka 30%. Partai Demokrat masih mengalami kesulitan dalam merekrut perempuan untuk bergabung dalam partai. Perempuan masih enggan untuk terjun ke dunia politik, walaupun partai telah mengusahakan agar animo perempuan untuk bergabung dengan partai tinggi. Hal ini seperti yang disampaikan oleh wakil ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Tanah Datar berikut ini:

"... keinginan perempuan untuk terjun ke bidang politik masih sangat rendah, dengan keadaan yang seperti ini menyulitkan partai untuk merekrut perempuan, karena masih ada perempuan yang beranggapan bahwa bidang politik bukan bidang yang cocok bagi mereka..."⁴⁷

Masih adanya perempuan yang beranggapan bahwa bidang politik merupakan bidang laki-laki membuat partai kesulitan untuk merekrut perempuan untuk bergabung dalam partai. Untuk mengatasi hal tersebut partai Demokrat mewadahi perempuan dengan dibentuknya bidang perempuan dalam kepengurusan partai yaitu bidang pemberdayaan perempuan. Bidang pemberdayaan perempuan ini dikepalai langsung oleh perempuan partai demokrat.

⁴⁷ Wawancara dengan wakil ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Tanah Datar, Mardaus Metha, pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 pukul 10.00 wib kantor DPC Partai Demokrat Kabupaten Tanah Datar

Seperti yang disampaikan oleh wakil ketua DPC Partai Demokrat dalam

wawancara:

"...pada Partai Demokrat sendiri di dalam kepengurusannya terdapat bidang kewanitaan, yaitu bidang pemberdayaan perempuan, di bidang pemberdayaan perempuan ini kami mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberikan ruang gerak bagi perempuan seluas-luasnya, selain itu kami juga memberikan pelatihan-pelatihan kepemimpinan guna mempersiapkan perempuan untuk terjun ke arena pemilu..."⁴⁸

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh anggota partai perempuan partai

Demokrat yang juga merupakan caleg dari Partai Demokrat pada pemilu 2009,

seperti berikut:

"...di Partai Demokrat kami para perempuan di beri wadah untuk mengeluarkan aspirasi dan berpartisipasi, selain itu kami juga diberi bekal untuk menghadapi pemilu, selain itu ada salah seorang kader perempuan kami yang di kirim ke Cikeas untuk pelatihan kepemimpinan tidak hanya itu program yang kami rancang dalam bidang perempuan diantaranya yaitu: advokasi perempuan, peningkatan sumber daya dalam bidang ekonomi, sosial dan politik serta membangun jaringan dengan kelompok lain seperti kelompok anak muda dan menyediakan pelayanan untuk ibu dan anak dalam hal pendidikan dan kesehatan..."⁴⁹

Bidang pemberdayaan perempuan yang ada di Partai Demokrat merupakan wadah perempuan yang mana bidang tersebut perempuan diberi kesempatan untuk menyampaikannya aspirasinya dan berpartisipasi. Selain itu untuk meningkatkan keterampilan perempuan Partai Demokrat memberikan pelatihan-

⁴⁸ Wawancara dengan wakil ketua DPC partai Demokrat Kabupaten Tanah Datar, Mardaus Mehta, pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 pukul 10.00 WIB di kantor DPC Partai Demokrat Kabupaten Tanah Datar

⁴⁹ Wawancara dengan perempuan partai DPC Partai Demokrat Kabupaten Tanah Datar, Dra. Donna, pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2010 pukul 17.00 WIB di rumah Dra. Donna

pelatihan kepemimpinan untuk perempuan. Peningkatan sumber daya manusia dalam berbagai bidang juga dilakukan oleh partai demokrat. Dalam menghadapi pemilu perempuan dipersiapkan dengan melatih perempuan untuk menjadi kandidat di tingkat lokal, propinsi dan tingkat nasional termasuk didalamnya mengenai sistem pemilu, kampanye dan sebagainya.

Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak juga merupakan salah satu rancangan yang dibuat oleh Partai Demokrat dalam rangka meningkatkan keterwakilan perempuan. Kerjasama yang dibuat berupa jaringan dengan kelompok lain seperti kelompok anak muda dan media massa. Tidak hanya itu Partai Demokrat juga menyediakan pelayanan untuk ibu dan anak dalam hal pendidikan dan kesehatan.

Tabel 5.2
Bentuk kegiatan yang Dilaksanakan Bidang Pemberdayaan Perempuan

No	Bentuk Kegiatan	Tujuan Kegiatan
1.	Pelatihan-pelatihan – Persiapan menghadapi Pemilu – Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam bidang ekonomi, sosial dan politik – Pelatihan dikepemimpinan di tingkat daerah dan pusat	Mempersiapkan dan melatih perempuan menghadapi pemilu, untuk menjadi kandidat di tingkat lokal, propinsi dan di tingkat nasional, dan pemahaman terhadap sistem pemilu dan kampanye.
2.	Pelaksanaan kegiatan rutin – Pertemuan bulanan – Pelayanan pendidikan dan kesehatan	Mejalan dan mempererat rasa kekeluargaan dan memberdayakan kemampuan perempuan dengan memberikan manfaat pada orang lain
3.	Menjalin Kerjasama dengan pihak lain – Kerjasama dengan kelompok anak muda – Kerjasama dengan organisasi masyarakat lainnya.	Membangun kerjasama yang baik dengan pihak lain dan meberikan pencitraan partai yang baik dimata masyarakat. Dan dengan kerjasama yang dibuat diharapkan perempuan mendapatkan tempat di masyarakat

Sumber : Hasil Wawancara dengan Perempuan Partai Demokrat

B. Analisis Rekrutmen Perempuan Yang Dilakukan Partai

Untuk mencapai keterwakilan perempuan di parlemen dimulai dengan adanya keterwakilan perempuan di partai, untuk mencapai itu maka partai perlu mempersiapkan kader-kader perempuan partai untuk menghadapi pemilu. Salah satu caranya yaitu melakukan rekrutmen terhadap perempuan. Sesuai dengan fungsi partai politik yaitu partai politik sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Rekrutmen politik merupakan cara untuk meraih orang-orang dari berbagai kalangan yang dianggap mampu untuk berperan dalam proses politik dan sekaligus salah satu cara untuk menyeleksi calon pemimpin yang berkualitas, tak terkecuali perempuan sekali pun.

Dalam perekrutan kader-kader perempuan tersebut partai tidak asal merekrut, tapi partai juga memperhatikan aspek-aspek standar pelaksanaan rekrutmen politik yang mana aspek-aspek tersebut telah tercantum dalam AD/ART masing-masing partai.

Masing-masing partai memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam melakukan rekrutmen, tapi pada dasarnya selalu memperhatikan aspek-aspek rekrutmen. Seperti yang diungkapkan oleh wakil ketua DPD partai demokrat berikut ini:

"... kami Partai Demokrat dalam ART telah tercantum bagaimana persyaratan untuk menjadi anggota, selain mengacu pada ART kami juga memperhatikan bagaimana latar belakang calon anggota, seperti pendidikan, reputasinya di masyarakat dan lain sebagainya dan kami tidak

membedakan antara perempuan dan laki-laki semuanya sama...”⁵⁰

Pernyataan ini tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh ketua DPD partai Golkar berikut ini:

“...dalam melakukan rekrutmen anggota partai kami kami tidak membedakan laki-laki dan perempuan, dalam melakukan rekrutmen kami memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang, seperti dengan ketentuan keterwakilan 30% perempuan, di Partai Golkar sendiri ketentuan yang ada dalam penjaringan anggota partai adalah dengan mempertimbangkan prestasi, dedikasi dan loyalitas terhadap partai...”⁵¹

Dalam menjaring atau melakukan rekrutmen biasanya suatu partai menggunakan atau memperhatikan beberapa aspek dalam pelaksanaan rekrutmen. Pelaksanaan rekrutmen biasanya menggunakan beberapa aspek dasar sebagai standar pelaksanaan rekrutmen, adapun beberapa aspek sebagai pengukuran kualifikasi rekrutmen adalah (1) Moralitas (2) Akseptabilitas (3) Kapabilitas (4) Pluralisme (5) Gender.

Partai dalam melakukan rekrutmen dan penjaringan anggota partai apakah menggunakan aspek dasar tersebut. Berikut analisis proses rekrutmen perempuan yang dilakukan oleh Partai Golkar dan Partai Demokrat di Kabupaten Tanah Datar.

⁵⁰ Wawancara dengan wakil ketua DPC partai Demokrat Kabupaten Tanah Datar, Mardaus Metha, pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 pukul 10.00 wib kantor DPC Partai Demokrat Kabupaten Tanah Datar

⁵¹ Wawancara dengan ketua DPD partai Golkar Kabupaten Tanah Datar, Zulfadri Darma, pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010 pukul 11.00 wib kantor DPRD Kabupaten Tanah Datar

1. Analisis Proses Rekrutmen Perempuan Yang Dilakukan Oleh Partai Golkar

Dalam melakukan rekrutmen anggota Partai Golkar tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, dalam melakukan rekrutmen anggota partai memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang, seperti ketentuan keterwakilan 30% perempuan dalam kepengurusan partai.

Dalam proses perekrutan anggota partai, partai Golkar juga memperhatikan aspek-aspek standar pelaksanaan rekrutmen politik, yang mana aspek-aspek standar tersebut tercantum dalam JUKLAK yang merupakan pedoman bagi Partai Golkar dalam melakukan proses rekrutmen anggota partai. Seperti yang disampaikan oleh Ketua DPD Partai Golkar dalam wawancaranya:

"...Dalam pelaksanaan rekrutmen anggota partai, Partai Golkar berpedoman pada JUKLAK, yang mana dalam JUKLAK tersebut telah tercantum aspek-aspek standar rekrutmen yang kami gunakan dalam proses rekrutmen..."⁵²

Aspek moralitas sebagai salah satu aspek dasar dalam rekrutmen yang digunakan atau di pakai oleh partai golkar dalam melakukan penjangkaran anggota partai. Hal ini bisa dilihat ada syarat yang mengatakan tidak pernah di jatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan, ini merupakan persyaratan yang menggambarkan bahwa Partai Golkar memperhatikan aspek-aspek tersebut dalam pelaksanaan rekrutmen. Seperti yang dikatakan oleh salah seorang perempuan partai Golkar dalam wawancara yang mengatakan:

"...Dalam hal penjangkaran dan perekrutan anggota partai dengan memperhatikan aspek-aspek rekrutmen yang pertama

⁵² Wawancara dengan ketua DPD partai Golkar Kabupaten Tanah Datar, Zulfadri Darma, pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010 pukul 11.00 wib kantor DPRD Kabupaten Tanah Datar

yaitu aspek moralitas, apakah seseorang pernah dijatuhi hukuman pidana, selain itu dilihat juga dari bagaimana reputasinya di masyarakat... ”⁵³

Dalam melakukan penjurangan partai Golkar sangat memperhatikan aspek moralitas yaitu hal ini dilihat dari adanya apakah seorang calon anggota partai pernah di jatuhi hukuman pidana, tidak hanya aspek moralitas yang digunakan sebagai acuan dalam penjurangan anggota partai, aspek akseptabilitas juga sangat diperhatikan, aspek akseptabilitas dilihat dari reputasi seorang calon dalam masyarakat, dan bagaimana kedekatan seorang calon anggota partai dengan masyarakat. Seperti yang disampaikan ketua DPD Partai Golkar dalam wawancaranya:

”...Kedekatan seorang calon anggota partai dengan masyarakat juga sangat kami perhatikan disini, bagaiman reputasinya di masyarakat dan bagaimana masyarakat menilai seorang calon anggota partai tersebut jugag sangat kami perhatikan, karena ini sangat menyangkut dengan kepercayaan masyarakat terhadap partai Golkar... ”⁵⁴

Aspek akseptabilitas merupakan aspek yang penting untuk di perhatikan dalam pelaksanaan rekrutmen anggota partai. Aspek akseptabilitas menunjukan bahwa seorang calon harus dapat diterima oleh masyarakat kerena telah melayani masyarakat. Hal ini akan sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap partai.

⁵³ Wawancara dengan perempuan partai DPD Partai Golkar Kabupaten Tanah Datar, Nurhayati, pada tanggal 20 Desember 2010 pada 13.00 wib kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Tanah Datar

⁵⁴ Wawancara dengan ketua DPD partai Golkar Kabupaten Tanah Datar, Zulfadri Darma, pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010 pukul 11.00 wib kantor DPRD Kabupaten Tanah Datar

Selain aspek moralitas dan akseptabilitas, aspek lain yang harus diperhatikan dalam rekrutmen anggota partai adalah aspek kapabilitas, aspek kapabilitas ini ditujukan kepada ukuran pendidikan dan keahlian seorang calon anggota partai. Maka dalam pelaksanaan rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Golkar Tanah Datar apakah memperhatikan kapabilitas seorang calon dalam melakukan rekrutmen calon anggota partai.

Berikut pernyataan ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tanah Datar dalam wawancaranya:

"...Ukuran pendidikan sangat penting dalam melakukan rekrutmen, kami partai Golkar sangat memperhatikan pendidikan dalam penjurangan wakil bupati ini, baik itu pendidikan formalnya maupun nonformal, karena pendidikan itu sangat mempengaruhi pola pikir seseorang, apalagi nantinya akan menjadi wakil rakyat..."⁵⁵

Pernyataan dari ketua DPD Partai Golkar tersebut di benarkan oleh salah seorang perempuan partai Golkar berikut ini:

"...Kapabilitas seorang calon anggota partai dalam penjurangan sangat kami perhatikan, karena kalau dilihat dari ukuran pendidikan, kami menerima yang berpendidikan paling rendah SLTA. Dan aturan ini tercantum dalam syarat yang akan di penuhi oleh bakal calon yang mendaftar pada Golkar..."⁵⁶

Kapabilitas yang merupakan ukuran pendidikan dalam pelaksanaan rekrutmen sangat di perhatikan oleh Partai Golkar dalam pelaksanaan rekrutmen calon anggota partai. Dengan menetapkan syarat bahwa pendidikan minimal

⁵⁵ Wawancara dengan ketua DPD partai Golkar Kabupaten Tanah Datar, Zulfadri Darma, pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010 pukul 11.00 wib kantor DPRD Kabupaten Tanah Datar

⁵⁶ Wawancara dengan perempuan partai DPD Partai Golkar Kabupaten Tanah Datar, Nurhayati, pada tanggal 20 Desember 2010 pada 13.00 wib kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Tanah Datar

SLTA atau sederajat sebagai salah satu syarat untuk mendaftar menjadi anggota partai, ini merupakan bahwa Golkar dalam pelaksanaan rekrutmen menggunakan aspek kapabilitas. Karena dalam melakukan rekrutmen partai Golkar menjangking orang-orang yang memiliki pendidikan dan keahlian serta memiliki intelektual yang tinggi.

Aspek rekrutmen selanjutnya yang merupakan aspek standar melakukan rekrutmen yang diperhatikan oleh partai Golkar dalam penjangking anggota partai adalah aspek pluralisme, yaitu membuka kemungkinan mempromosikan calon-calon yang berbeda identitas sosialnya. Pluralisme harus dijunjung dalam rekrutmen, yaitu kesiapan calon menjalankan amanat partai sebagai amanat rakyat.

Seperti halnya dalam melakukan rekrutmen anggota partai sangat memperhatikan aspek ini, hal ini disampaikan oleh ketua DPD partai Golkar bahwa:

"...Dalam hal melakukan rekrutmen anggota partai kami sangat bersifat nasionalis, maksudnya kami dalam menjangking anggota partai tidak membedakan asal, suku ataupun status sosial seseorang, semua yang memenuhi persyaratan kami persilahkan untuk masuk..."⁵⁷

Dalam pelaksanaan rekrutmen partai Golkar sangat menjunjung pluralisme, dapat dilihat pada pelaksanaan rekrutmen anggota partai tidak membedakan suku, agama ataupun etnisnya. Partai membuka lebar bagi setiap

⁵⁷ Wawancara dengan ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tanah Datar, Zulfabri Darma, pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010 pukul 11.00 wib kantor DPRD Kabupaten Tanah Datar

orang untuk bergabung tanpa membedakan identitas sosial dari setiap calon anggota.

Hal ini dibenarkan oleh salah seorang perempuan partai Golkar dalam wawancaranya:

"..Kami dalam melakukan penjurangan tidak ada membedakan, berdasarkan daerah, agama dan lainnya, kami menerima semua dari seluruh aspek, apakah yang mendaftar dari putra daerah, atau bukan, yang jelas memenuhi persyaratan kami terima. jadi dalam penjurangan semua sama-sama memiliki kesempatan..."⁵⁸

DPD Golkar Tanah Datar bersifat nasionalis dalam melakukan penjurangan anggota partai, semua warga negara memiliki hak yang sama untuk menjadi anggota partai tanpa membeda-bedakan asal usul daerah. Pada intinya DPD Golkar menunjang pluralisme dalam melakukan rekrutmen, sehingga membuka kemungkinan mempromosikan calon-calon yang berbeda identitas sosial, atau lainnya.

Untuk mencapai keterwakilan perempuan di partai dan di lembaga legislatif pertimbangan gender jadi sangat penting diperhatikan dalam proses pelaksanaan rekrutmen politik. Selain itu pertimbangan ini agar perempuan dapat diberi tempat dan ruang dalam ranah politik. Dimana partai mempertimbangkan instrumen intervensi agar perempuan bisa mendapatkan ruang untuk terlibat dalam pencalonan.

⁵⁸Wawancara dengan perempuan partai DPD Partai Golkar Kabupaten Tanah Datar yang menjadi caleg pada pemilu legislatif 2009 dan 2004, Yusmaniar, pada tanggal 6 April 2011 pada 13.00 wib kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Tanah Datar

Pertimbangan partai terhadap aspek gender dalam rekrutmen juga sangat diperhatikan oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Tanah Datar, seperti yang disampaikan Ketua DPD partai Golkar dalam wawancaranya berikut ini:

"...Kami Partai Golkar sangat terbuka dengan masalah gender, dalam setiap kegiatan partai kami sebisa mungkin selalu memperhatikan aspek gender, tidak kecuali dalam perekrutan anggota partai, kesempatan untuk perempuan dan laki-laki dalam rekrutmen ini sama. Ini dapat dilihat pada struktur kepengurusan partai Golkar. Kami sangat memberikan ruang bagi perempuan untuk ikut terlibat dalam perekrutan, karena kita melihat kualitas bukan perempuan atau laki-lakinya, terserah nanti pada pemilu yang terpilih laki-laki atau perempuannya, kami hanya berharap pilihan masyarakat ada pada partai Golkar dan dapat mewakili aspirasi masyarakat.."⁵⁹

Hal ini dibenarkan oleh perempuan Partai Golkar, yang juga pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar periode 2004-2009, melalui pernyataan berikut:

"...Partai Golkar sendiri sangat welcome dengan , dalam perkrutan calon anggota partai saja Partai Golkar tidak pernah membedakan perempuan dan laki-laki, disini yang dilihat adalah kualitas seseorang, bukan apa dia laki-laki atau perempuan..."⁶⁰

Pertimbangan gender ini telah terbukti dengan pelaksanaan rekrutmen anggota partai tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Partai Golkar sendiri sangat terbuka dengan masalah gender, ini dapat terlihat dalam setiap kegiatan yang ada sebisa mungkin memperhatikan kepentingan perempuan, begitu juga

⁵⁹ Wawancara dengan ketua DPD partai Golkar Kabupaten Tanah Datar, Zulfadri Darma, pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010 pukul 11.00 wib kantor DPRD Kabupaten Tanah Datar

⁶⁰ Wawancara dengan perempuan partai DPD Partai Golkar Kabupaten Tanah Datar, Ivonne Esterlie, pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2010 pukul 12.00 wib kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Tanah Datar

dengan pelaksanaan rekrutmen anggota partai. Bukti bahwa partai golkar telah memperhatikan gender adalah pada strukrur kepengurusan partai yang mana setiap anggota diberikan ruang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing anggota partai, seperti parempuan tidak hanya ditempatkan di bidang perempuan saja.

Dengan dijalankan usaha-usaha yang telah disampaikan diatas diharapkan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Tanah Datar dapat meningkat. Namun pada kenyataannya pada partai Golkar sendiri terjadi penurunan keterwakilan perempuan di DPRD, yang mana pada pemilu legislatif 2004 partai Golkar memiliki 2 orang wakil perempuan di DPRD, dan pada pemilu legislatif 2009 tidak ada wakil perempuan yang duduk di DPRD. Hal ini sangat disayangkan , seperti yang disampaikan oleh ketua DPD partai Golkar berikut ini:

"...Kami sangat menyayangkan ketika pada pemilu legislatif 2009 kemaren tidak seorang pun caleg perempuan dari partai kami yang mendapat kursi di DPRD, padahal dari partai sendiri telah berusaha agar keterwakilan perempuan di DPRD dapat meningkat..."⁶¹

Hal ini diperjelas dengan pernyataan caleg perempuan partai Golkar yang gagal mendapatkan kursi di DPRD pada pemilu 2009, sebagai berikut:

"...Saya juga sangat kecewa ketika tidak mendapatkan kursi di DPRD, karena pada saat hasil pemilu saya mendapat suara yang banyak, tapi saya tidak mendapatkan kursi di DPRD, itu kenapa, disebabkan oleh sistem perhitungan suara, setiap dapil mendapatkan tiga kursi bagi suara caleg yang terbanyak, jadi pada saat itu saya merupakan caleg perempuan yang mendapatkan suara terbanyak di dapil

⁶¹ Wawancara dengan ketua DPD partai Golkar Kabupaten Tanah Datar, Zulfadri Darma, pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010 pukul 11.00 wib kantor DPRD Kabupaten Tanah Datar

tersebut, tapi karena tiga orang yang suaranya tertinggi adalah caleg laki-laki, jadi dari dapil tersebut tidak ada satu pun wakil perempuan, dengan hal ini saya harap affirmative action yang disuarakan selami ini tidak hanya diterapkan pada saat pencalonan saja, tapi pada saat penghitungan suara juga diterapkan...”⁶²

Partai telah berusaha agar keterwakilan perempuan agar keterwakilan perempuan dapat meningkat, tapi tujuan tersebut belum dapat dicapai. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya seperti yang disampaikan oleh Ivone Esterly diatas, bahwa yang menyebabkan tidak terpilihnya adalah kerana sistem penghitungan suara yang tidak berpihak pada perempuan, namun hal ini tidak berarti perempuan ingin diberikan perlakuan istimewa, dan berharap *affirmative action* dapat diterapkan juga pada saat penghitungan suara tidak hanya pada saat pencalonan saja.

2. Analisis Proses Rekrutmen Perempuan Yang Dilakukan Oleh Partai Demokrat

Dalam pelaksanaan rekrutmen anggota partai, partai Demokrat berpedoman pada AD/ART yang ada, dalam AD/ART tersebut tercantum ketentuan proses rekrutmen anggota partai. selain mengacu pada AD/ART partai demokrat dalam melakukan rekrutmen juga memperhatikan aspek-aspek standar dari rekrutmen politik.

Hal ini juga disampaikan oleh wakil ketua DPC Partai Demokrat berikut ini:

⁶² Wawancara dengan perempuan partai DPD Partai Golkar Kabupaten Tanah Datar, Ivonne Esterlie, pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2010 pukul 12.00 wib kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Tanah Datar

"...dalam perekrutan anggota partai, kami melaksanakan perekrutan berdasarkan aturan yang ada yaitu apakah telah memenuhi persyaratan administrasi, dan tidak hanya itu kami juga memperhatikan bagaimana moralnya, maksudnya apakah calon tersebut pernah di penjara atau pernah dijatuhi hukuman, ini sangat penting yang mana hal tersebut akan memberikan pencitraan bagi partai..."⁶³

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh perempuan partai yang juga merupakan pengurus partai Demokrat, bahwa:

"...perekrutan anggota dilaksanakan berdasarkan aspek-aspek standar rekrutmen politik yang ada, aspek moralitas, kita melihat apakah seorang calon anggota partai pernah berurusan dengan hukum, seperti pernah di penjara, dijatuhi pidana, selanjutnya aspek akseptabilitas, bagaimana masyarakat menilai seorang calon, apakah mereka suka atau tidak suka...sebenarnya aturan-aturan ini termuat di AD/ART namun tidak dijabarkan satu-persatu..."⁶⁴

Dalam proses pelaksanaan rekrutmen anggota partai, partai demokrat sangat memperhatikan aspek-aspek satandar dari rekrutmen politik. Aspek moralitas merupakan aspek pertama yang sangat diperhatikan oleh Partai Demokrat, aspek ini sangat penting untuk di perhatikan, karena menurut partai Demokrat ini akan sangat berpengaruh terhadap pandangan masyarakat terhadap partai, seperti yang dikatakan oleh wakil ketua DPC Partai demokrat dalam wawancaranya:

"...moral seseorang sangat kami perhatikan dalam merekrut anggota partai, karena partai merupakan sarana penyampaian aspirasi, jadi diperlukan kader-kader yang dapat di percaya oleh rakyat, jadi apabila kadernya tidak

⁶³ Wawancara dengan wakil ketua DPC partai Demokrat Kabupaten Tanah Datar, Mardaus Metha, pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 pukul 10.00 wib kantor DPC Partai Demokrat Kabupaten Tanah Datar

⁶⁴ Wawancara dengan perempuan partai DPC Partai Demokrat Kabupaten Tanah Datar, Dra. Donna, pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2010 pukul 17.00 wib rumah Dra. Donna

memiliki maoral yang baik bagaiman masyarakat akan percaya pada partai, kalau kadernya pernah melakukan tindak kriminal...”⁶⁵

Aspek selanjutnya yang juga sangat diperhatikan oleh partai demokrat dalam pelaksanaan penjaringan anggota partai adalah aspek akseptabilitas, yaitu dimana seorang calon anggota partai tersebut dapat diterima oleh masyarakat karena telah melayani masyarakat. Hal ini dapat ditunjukkan melalui rekomendasi atau dukungan dari arus bawah atau masyarakat.

Dalam pelaksanaan rekrutmen anggota partai Demokrat juga menerima masukan dari masyarakat tentang bagaimana reputasi dan kedekatan seorang calon dengan masyarakat. Dengan mempertimbangkan apakah seorang calon anggota partai diterima dengan baik dimasyarakat. Dan apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh calon anggota partai tersebut memiliki dampak yang baik dalam masyarakat.

Seperti yang dikatakan oleh wakil ketua DPC partai demokrat dalam wawancaranya berikut ini:

”...penilaian-penilaian dari masyarakat terhadap seorang calon anggota partai juga sangat kami perhatikan, seberapa dekat calon tersebut dengan masyarakat dan bagaimana reputasi seorang individu dimasyarakat sangat menentukan untuk menjadi anggota partai demokrat...”⁶⁶

Selain aspek moralitas dan akseptabilitas dalam rekrutmen politik juga ada aspek kapabilitas, yaitu aspek ini ditujukan kepada ukuran pendidikan atau

⁶⁵ Wawancara dengan wakil ketua DPC partai Demokrat Kabupaten Tanah Datar, Mardaus Metha, pada hari Rabu tanggal 15 desember 2010 pukul 10.00 wib kantor DPC Partai Demokrat Kabupaten Tanah Datar

⁶⁶ Wawancara dengan wakil ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Tanah Datar, Mardaus Metha, pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 pukul 10.00 wib kantor DPC Partai Demokrat Kabupaten Tanah Datar

keahlian seorang calon anggota partai, ukuran ini tidak hanya berpatokan kepada ukuran formalitas, seperti ijazah tingkat pendidikan tetapi juga ukuran kepekaan sosial.

Berikut pernyataan wakil ketua DPC partai Demokrat Kabupaten Tanah Datar yang mengatakan:

"... pendidikan seorang calon anggota partai sangat kami perhatikan, jadi kapabilitas seseorang merupakan syarat penting, kami Partai Demokrat menetapkan SLTA sebagai ukuran minimal pendidikan seorang calon anggota partai..."⁶⁷

Hal ini dibenarkan oleh pernyataan perempuan partai demokrat yang mengatakan:

"...dalam penjurangan calon anggota partai ukuran pendidikan sangat diperhatikan, mengapa demikian karena pendidikan seseorang akan menentukan kualitas seseorang dan merupakan nilai penting bagi masyarakat untuk memilih partai di saat pemilu, jadi di partai Demokrat menetapkan SLTA sebagai ukuran minimal...."⁶⁸

Dalam penjurangan anggota partai, partai Demokrat sangat memperhatikan pendidikan seorang calon anggota partai, karena menurut partai demokrat pendidikan sangat menentukan kualitas dan cara pikir seseorang dalam melaksanakan dan mempertanggung jawabkan visi dan misi partai. Dan oleh karena itu partai menetapkan SLTA sebagai ukuran minimal seorang calon anggota

⁶⁷Wawancara dengan wakil ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Tanah Datar, Mardaus Metha, pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 pukul 10.00 wib kantor DPC Partai Demokrat Kabupaten Tanah Datar

⁶⁸ Wawancara dengan perempuan partai DPC Partai Demokrat Kabupaten Tanah Datar, Leri Fransiska, pada hari Kamis tanggal 7 April 2011 pukul 14.00 wib Kantor DPC Partai Demokrat

partai. Tidak hanya itu partai Demokrat tidak hanya memperhatikan pendidikan formal seorang calon anggota partai, tapi juga pendidikan informalnya.

Aspek plurlisme merupakan aspek yang juga sangat diperhatikan dalam proses rekrutmen politik, partai Demokrat sendiri sangat menjunjung pluralisme dalam melaksanakan rekrutmen anggota partai. Hal ini seperti yang disampaikan oleh wakil ketua DPC Partai Demokrat dalam wawancaranya :

"...Penjaringan yang kami lakukan terbuka, jadi kami tidak ada membedakan asal, atau identitas sosial, tidak membedakan ini dari daerah ini diterima, dan dari daerah ini tidak diterima, karena kami mememberikna kesempatan bagi semua orang untuk mendaftar menjadi anggota partai Demokrat. Tidak ada perbedaan berdasarkan suku atau wilayah, semua sama dan sama-sama warga indoneisa yang memiliki hak untuk mendaftar pada partai sebagai anggota partai..."⁶⁹

Dalam melakukan penjaringan anggota Partai Demokrat lakukan dengan sangat terbuka, setiap kalangan mendapat kesempatan bergabung dengan partai. Dalam hal ini Partai Demokrat tidak membedakan asal, suku, agama dan etnis seorang calon anggota. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama.

Menyangkut keterwakilan perempuan partai demokrat dalam merkrut anggota partai memperhatikan aspek gender, aspek gender merupakan aspek standar dari rekrutmen politik. Dalam perekrutan anggota partai tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, setiap orang memiliki kesempatan yang sama.

⁶⁹ Wawancara dengan wakil ketua DPC partai Demokrat Kabupaten Tanah Datar, Mardaus Metha, pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 pukul 10.00 wib kantor DPC Partai Demokrat Kabupaten Tanah Datar

Hal ini disampaikan oleh perempuan partai dari partai demokrat yang juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Periode 2009-2014, yang mengatakan:

"...Dalam proses perekrutan anggota partai pertimbangan gender sangat diperhatikan, partai tidak membedakan laki-laki atau perempuan, yang dilihat disini adalah kemampuannya, apakah orang tersebut mampu menjalankan tugas yang diberikan atau tidak, selain itu hal ini juga sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu ketentuan quota 30% keterwakilan perempuan..."⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas pertimbangan gender sangat diperhatikan oleh Partai Demokrat dalam perekrutan anggota partai. Partai tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, yang dilihat disini adalah kualitas individu tersebut. Selain itu pertimbangan gender ini didukung oleh ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan yang tercantum dalam undang-undang.

Dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di politik diperlukan suatu usaha untuk menimbulkan keinginan perempuan untuk terjun ke ranah politik. Dengan menyediakan wadah atau organisasi yang menampung aspirasi dan kepentingan perempuan tersebut. Dalam hal ini partai politik merupakan solusi yang efektif. Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan peran dan keterwakilan perempuan melalui proses pemberdayaan perempuan dalam segala bidang dengan menyediakan wadah dan memberi ruang gerak kepada perempuan tanpa membedakannya dengan laki-laki.

⁷⁰ Wawancara dengan perempuan Partai Demokrat dan juga Anggota Legislatif Perempuan Kabupaten Tanah Datar, Erna, pada tanggal 20 Desember 2010 pukul 12.00 wib kantor DPRD Kabupaten Tanah Datar

Pada intinya setiap orang mendapat kesempatan yang untuk dapat berpartisipasi dalam partai dan ranah politik. Yang mana merupakan perwujudan dari fungsi partai yaitu sebagai sarana partisipasi politik warga negara Indonesia.

C. Hambatan Dan Kendala Yang Dihadapi Oleh Anggota Legislatif Perempuan terhadap Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif Kabupaten Tanah Datar

Setelah melihat data-data yang telah dikemukakan mengenai peran partai politik terhadap keterwakilan perempuan, disini menjadi sangat penting untuk mengetahui, mengkaji dan meneliti bagaimana sesungguhnya pengalaman politik perempuan itu sendiri dalam partai politik dan sebagai anggota legislatif.

Persoalan ini jadi sangat krusial, setelah kita melihat kenyataan perkembangan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif yang tidak ada perubahan signifikan. Seperti yang juga terjadi di DPRD Kabupaten Tanah Datar yang juga tidak mengalami perubahan terhadap keterwakilan perempuan di legislatif. Sejak pemilu legislatif 2004 keterwakilan perempuan di DPRD hanya ada 3 orang perempuan dan tidak mengalami perubahan pada pemilu legislatif 2009 yang keterwakilan perempuan tetap dengan 3 orang perempuan di DPRD.

Keterlibatan perempuan di ranah politik memberikan warna baru perpolitikan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Tanah Datar. Alasan setiap aktivis perempuan untuk terjun ke politik pun berbeda-beda. Berikut beberapa alasan yang disampaikan aktivis perempuan, seperti yang disampaikan oleh perempuan partai Golkar Ibu Ivonne Estrelie yang juga pernah menjadi anggota legislatif DPRD Kabupaten Tanah Datar periode 2004-2009 dalam wawancaranya:

"...saya tertarik terjun ke politik karena saya suka dengan kegiatan berorganisasi, semenjak di bangku sekolah saya telah mulai berorganisasi, dan setelah tamat kuliah saya aktif dengan organisasi kemasyarakatan, terutama dalam organisasi perempuan, seperti pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak, dan sekarang ikut bergabung dengan Partai Golkar dan pernah menjadi anggota legislatif DPRD Kabupaten Tanah Datar periode 2004-2009..."⁷¹

Alasan lain juga disampaikan oleh Ibu Erna yang merupakan anggota legislatif DPRD Kabupaten Tanah Datar dari Partai Demokrat periode 2009-2014 yang mengatakan:

"...saya ini juga baru berpolitik, saya senang berorganisasi, saya mulai dari kegiatan-kegiatan ibu-ibu seperti PKK, dharmawanita dan juga kegiatan perempuan lainnya. Pada saat itu saya masih merupakan seorang PNS, saya seorang bidan, jadi kegiatan saya banyak dalam lingkup kesehatan terutama perempuan dan anak, kalau seorang PNS kan tidak boleh ikut partai, dan pada ketika saya pensiun baru lah saya benar-benar ikut berpolitik dan bergabung dengan Partai Demokrat, awalnya diajak oleh teman, karena senang dengan kegiatan berorganisasi saya mau dan akhirnya dicalonkan jadi anggota legislatif dan alhamdulillah lolos..."⁷²

Pada awalnya perempuan ikut berpolitik dikarenakan mereka senang dengan kegiatan berorganisasi, dan melalui partai politik mereka dapat menyalurkannya. Namun tidak hanya itu alasan mengapa mereka ikut dalam politik, yaitu karena mereka ingin memperjuangkan nasib perempuan yang sering

⁷¹Wawancara dengan perempuan partai DPD Partai Golkar Kabupaten Tanah Datar, Ivonne Esterlie, pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2010 pukul 12.00 wib kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Tanah Datar

⁷²Wawancara dengan perempuan Partai Demokrat dan juga Anggota Legislatif Perempuan Kabupaten Tanah Datar, Erna, pada tanggal 20 Desember 2010 pukul 12.00 wib kantor DPRD Kabupaten Tanah Datar

merasakan direndahkan dimasyarakat, seperti yang disampaikan Ibu Erna berikut ini:

"...selain saya senang, saya juga ingin membuktikan kepada masyarakat bahwa saya juga bisa setara dengan laki-laki terutama dalam kualitas, dan agar perempuan tidak di pandang rendah dimasyarakat..."⁷³

Hal ini didukung dengan pernyataan Ibu Ivonne Esterli berikut ini:

"...Nasib perempuan di negara ini juga ditentukan oleh seberapa banyak keterwakilan perempuan di legislatif, eksekutif dan yudikatif. Oleh karena itu lah diperlukannya perempuan untuk memperjuangkan nasib perempuan itu sendiri, begitu juga saya yang juga ingin memperjuangkan nasib kaum saya..."⁷⁴

Dengan adanya kenyataan seperti saat sekarang ini kebanyakan dari perempuan telah menyadari pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik dan pemberdayaan perempuan. Walau demikian keterwakilan perempuan di legislatif masih belum dapat dikatakan membanggakan, karena quota 30% yang di gaung-gaung belumlah tercapai, keterwakilan masih sangat rendah, seperti keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Tanah Datar yang hanya mencapai angka 10%. Dan dengan pencapaian tersebut perempuan di legislatif terus berusaha agar mereka juga mampu untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan aturan dan kemampuan yang mereka miliki. Walaupun demikian bukan berarti mereka tidak mengalami kendala dalam melaksanakan kegiatan di legislatif, apalagi dengan adanya publik yang selalu membandingkan dengan laki-laki.

⁷³ Wawancara dengan perempuan Partai Demokrat dan juga Anggota Legislatif Perempuan Kabupaten Tanah Datar, Erna, pada tanggal 20 Desember 2010 pukul 12.00 wib kantor DPRD Kabupaten Tanah Datar

⁷⁴ Wawancara dengan perempuan partai DPD Partai Golkar Kabupaten Tanah Datar, Ivonne Esterlie, pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2010 pukul 12.00 wib kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Tanah Datar

Berikut yang menjadi kendala bagi kaum perempuan dalam melaksanakan segala aktivitas mereka di legislatif:

1. Kendala Internal

Yang paling utama yaitu menyangkut masalah fisik, baik itu ketahanan, stamina dan kebugaran tubuh. Apabila seorang perempuan telah melakukan aktivitas terlalu tinggi dan banyak maka berbagai keluhan sering datang dan jadi gampang terserang penyakit. Seperti yang dikatakan oleh anggota legislatif dari Partai Demokrat berikut:

"...sebagai gambaran saya di legislatif, masuk jam 9 pagi, dan terkadang ada kunjungan ke wilayah-wilayah dan belum lagi adanya rapat dengan pemerintah daerah dan partai yang harus di hadiri, kita kan tahu waktunya terkadang tidak menentu. dalam satu hari bisa ada dua atau tiga rapat yang harus dihadiri, terkadang tidak dapat saya hadiri karena kecapekan..."⁷⁵

Hal yang ini dibenarkan oleh ibu Ivonne Esterlie dalam wawancaranya :

"... Sebenarnya secara teori kita sudah tau cara penanggulangannya, dengan makan teratur, istirahat cukup dan olah raga, pokoknya hidup seimbang. Tapi seringkali kewajiban yang ada itu jauh lebih banyak dari waktu yang ada. Sehingga sulit untuk mengaturnya, dan ujung-ujungnya sakit..."⁷⁶

Kendala kedua, menyangkut tugas dan tanggung jawabnya kepada keluarga. Seperti yang diketahui bahwa tugas utama seorang perempuan adalah sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Ikut aktif dalam aktivitas politik

⁷⁵ Wawancara dengan anggota legislatif perempuan dari Partai Demokrat, Erna, pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010 pukul 12.00 wib kantor DPRD Kabupaten Tanah Datar

⁷⁶ Wawancara dengan perempuan partai DPD Partai Golkar Kabupaten Tanah Datar, Ivonne Esterlie, pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2010 pukul 12.00 wib kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Tanah Datar

ditengah-tengah masyarakat bukan berarti boleh baginya untuk meninggalkan atau melalaikan tugas utamanya dirumah. Apabila seorang ibu mengalami benturan antara aktivitas politik dan aktivitas rumah tangganya, berarti ia menghadapi benturan antara dua hal yang sama-sama merupakan kewajiban.

Apabila tugasnya dalam aktivitas politik ini bisa dikerjakan orang lain, sedangkan sebagian tugasnya dirumah sebagai istri dan ibu tidak bisa digantikan orang lain, maka ia harus mendahulukan tugasnya didalam rumah tangga. Tetapi tidak berarti ia meninggalkan kewajibannya dalam politiknya. Ia harus segera mencari jalan keluar agar kedua kewajibannya dapat berjalan dengan baik dan sempurna. Misalnya ia akan berusaha mencari orang yang dapat membantu tugas-tugasnya dirumah tangga atau orang yang dipercaya bisa mengasuh anaknya dengan pengasuhan yang aman bagi perkembangan fisik, mental dan nilai agama bagi anaknya. Seperti yang disampaikan Ibu Erna dalam wawancaranya:

"...pada awal-awal nya memang sulit bagi saya untuk mengerjakannya, membagi waktu antara pekerja di legislatif dan rumah tangga, tapi keduanya merupakan kewajiban bagi saya, dan akhirnya saya menggunakan jasa pembantu untuk menolong..."⁷⁷

Kendala ketiga, menyangkut kesiapan mental, karena perempuan seringkali menjadi bulan-bulanan bila tidak percaya diri, tidak tahan banting dan bermental baja. Begitu juga dari segi intelektual. Karena untuk dapat terlibat aktif dalam persoalan politik, disamping mempersiapkan diri, mereka juga harus

⁷⁷ Wawancara dengan anggota legislatif perempuan dari Partai Demokrat, Erna, pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010 pukul 12.00 wib kantor DPRD Kabupaten Tanah Datar

membekali diri dengan ilmu pengetahuan terutama menyangkut persoalan politik, sehingga tidak menjadi gentar bila harus berkompetisi dengan kaum laki-laki.

2. Kendala Eksternal

Yang pertama yaitu ketidaksiapan laki-laki menerima kaum perempuan sebagai mitra sehingga dianggap sebagai pesaing atau kompetitor murni, Pengalaman hidup perempuan yang secara biologis tidak bebas, dibandingkan laki-laki, seperti hamil, melahirkan dan menyusui, membuat perempuan terpisah dari kehidupan publik yang pada akhirnya melahirkan budaya *patriarkhi* ditengah-tengah masyarakat. *Patriarkhi* yang berarti kekuasaan bapak, semula hanya berlaku dalam keluarga. Tetapi setelah cara berpikir *patriarch* ini mengakumulasi, terciptalah cara berpikir pasangan (*biner*) dan dikotomis yang memposisikan si kuat menentukan kehidupan si lemah. Maka secara alamiah pula segala aspek kehidupan publik menjadi bagian laki-laki

Kendala kedua yaitu ketidaksiapan masyarakat melihat kaum perempuan terjun ke dunia politik. dalam aplikasinya seringkali perempuan terhalang oleh adanya stigma bahwa dunia politik identik dengan dunia yang kotor dan tidak ramah, sehingga perempuan dianggap tidak pantas untuk turut terlibat dan berkecimpung dalam kehidupan politik. Hal ini didukung dengan pernyataan Ibu Ivonne Esterlie berikut:

"... masyarakat masih beranggapan bahwa perempuan tidak pantas duduk di parlemen, ini dapat dilihat ketika saat pelaksanaan menjelang pemilu yaitu saat kita kampanye,

meraka menganggap tugas perempuan itu dirumah mengurus rumah...⁷⁸

Kendala ketiga yang dihadapi oleh perempuan di legislatif adalah mengenai jumlah pendukung dalam mengambil keputusan yang menyangkut masalah perempuan. Dengan keadaan tersebut sering kali kepentingan perempuan terabaikan hanya karena kalah suara dengan anggota legislatif laki-laki.



⁷⁸ Wawancara dengan perempuan partai DPD Partai Golkar Kabupaten Tanah Datar, Ivonne Esterlie, pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2010 pukul 12.00 wib kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Tanah Datar

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Untuk mewujudkan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif, Indonesia telah mengeluarkan serangkaian kebijakan yang mengatur mengenai penerapan kuota melalui badan hukum. Sistem kuota ini bertujuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan karena masalah yang biasanya yang muncul adalah kurangnya keterwakilnya perempuan.

Berdasarkan Undang-Undang no 2 tahun 2008 tentang partai politik tercantum bahwa pendirian dan pembentukan partai politik menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Hal ini merupakan suatu tantangan bagi partai politik untuk dapat memajukan kaum perempuan dan merupakan suatu kesempatan luas bagi kaum perempuan untuk berkiprah dalam ranah politik. Dengan ketentuan ini keterwakilan perempuan di lembaga legislatif juga dapat terwakili. Partai politik merupakan satu-satunya organisasi politik secara sah dapat ikut pemilu. Sebagai organisasi yang mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat secara umum diharapkan partai juga dapat mengangkat aspirasi dan kepentingan perempuan.

Keterlibatan perempuan di partai dan legislatif dianggap suatu yang sangat penting, mengingat adanya kebutuhan-kebutuhan khusus perempuan di dalam masyarakat, yang hanya dapat dipahami oleh perempuan secara optimal itu sendiri, misalnya masalah kesejahteraan keluarga, kesehatan reproduksi dan

anak, kekerasan seksual, dan sebagainya. Sehingga dengan keterlibatan perempuan dalam partai maupun sampai ketingkat legislatif dapat memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi terpenuhinya kebutuhan kaum perempuan itu sendiri.

Dalam hal ini diperlukan peran dari partai, yaitu peran partai dalam meningkatkan keterwakilan perempuan. Menurut Parson peran adalah wujud pelaksanaan fungsi sesuai dengan status yang dimiliki, berupa upaya serangkaian tindakan dan perilaku. Jadi disini peran partai adalah bagaimana partai melaksanakan fungsi sebagai partai politik, fungsi partai politik diantaranya yaitu sebagai sarana aspirasi rakyat dan sarana rekrutmen politik.

Bentuk dari pelaksanaan fungsi partai sebagai sarana aspirasi rakyat yaitu partai telah menyediakan wadah untuk menyalurkan kepentingan rakyat pada umumnya. Salah satunya untuk mendukung keterwakilan perempuan partai telah menyediakan wadah untuk berekspresi bagi perempuan, yaitu adanya departemen perempuan dalam susunan kepengurusan disetiap partai, perempuan diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan perempuan, seperti mengadakan diskusi-diskusi masalah khusus yang dihadapi perempuan dalam melaksanakan aktivitas partai. Perempuan diberikan pelatihan-pelatihan kepemimpinan, tentang sistem pemilu, kampanye dan berhubungan dengan media massa. Usaha lain yang dilakukan partai yaitu menjalin jaringan kerja sama untuk mendukung kandidat perempuan dalam pemilu dan anggota legislatif perempuan yang terpilih.

Fungsi selanjutnya yaitu partai sebagai sarana rekrutmen politik. Rekrutmen politik adalah cara untuk meraih orang-orang dari berbagai kalangan

yang dianggap mampu untuk berperan dalam dalam proses politik dan sekaligus salah satu cara untuk menyeleksi calon-calon pemimpin yang berkualitas atau secara khusus rekrutmen dapat diartikan sebagai suatu proses diman individu-individu diseleksi untuk menjalankan peranan-paranan politik dalam pemerintah melalui kriteria-kriteria. Rekrutmen politik juga dilaksanakan partai dalam mewujudkan keterwakilan perempuan. Rekrutmen dilaksanakan terhadap perempuan dengan memperhatikan aspek-aspek dasar rekrutmen. Partai merekrut dan memilih orang-orang yang dianggap mampu untuk berperan aktif dalam proses politik dan menyeleksi calon-calon yang berkualitas. Selain itu dalam proses rekrutmen yang dilaksanakan partai tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan yang dilihat adalah kemampuan dan kualitas seseorang. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap partai sangat mendukung keterwakilan perempuan baik di partai maupun di lembaga legislatif.

Dengan dilaksanakannya peran partai tersebut diharapkan keterwakilan perempuan dapat meningkat. Namun pada kenyataannya keterwakilan perempuan masih belum dapat terwujud sepenuhnya, hal ini dikarenakan perekrutan perempuan di partai politik hanya karena adanya kebutuhan *affirmative action* 30% dan proses kaderisasi yang dilaksanakan partai belum terlalu serius menerapkan *affirmative action*. Selain itu perempuan masih belum sepenuhnya yang mau terjun langsung ke ranah politik, karena masih banyak yang berpikir bahwa politik bukan bidang yang cocok bagi perempuan.

Hal tersebut diatas berdampak pada keterlibatan perempuan di lembaga legislatif belum optimal, ini disebabkan adanya kendala internal berupa masalah

fisik, keluarga dan mental perempuan itu sendiri. Selanjutnya kendala eksternal yang dihadapi oleh perempuan di lembaga legislatif berupa ketidaksiapan laki-laki menerima perempuan sebagai mitra dan ketidaksiapan masyarakat menerima kehadiran perempuan di ranah politik.

B. SARAN

Dengan adanya kuota perempuan, kesempatan perempuan untuk berkiprah di ranah politik semakin lebar. Akan tetapi sebelum perempuan memasuki ranah politik baik di parlemen maupun eksekutif terlebih dahulu dilakukan penyadaran, pensosialisasikan dan pendidikan politik bagi perempuan, ini artinya bahwa telah ada upaya melakukan pelatihan dan pengkaderan terhadap perempuan-perempuan yang akan duduk di legislatif sehingga ketika perempuan masuk keparlemen perempuan mempunyai kapasitas.

Untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif diperlukan aksi dan strategi, yang pertama strategi dan aksi terhadap pemerintah, aktifitas diarahkan kepada kekuasaan negara, khususnya lembaga-lembaga negara dan parlemen dan kekuatan-kekuatan politik yang menjadi bagian di dalamnya. Adapun yang diharapkan yaitu perubahan kebijakan yang lebih memberikan tempat dan memberdayakan perempuan untuk terlibat di dunia politik. Yang kedua yaitu aksi dan strategi terhadap masyarakat, masyarakat disini meliputi antara lain keluarga, komunitas, lembaga masyarakat lainnya. Biasanya kegiatan ini lebih berjangka panjang. Peranan media massa, kalangan LSM dan kelompok-kelompok dan lembaga penelitian yang bergerak pada masalah-masalah perempuan

sangat menentukan. Hal yang ingin dicapai adalah adanya pembentukan pendapat umum dan juga perubahan kesadaran dan sikap masyarakat dalam melihat perempuan dan politik.



DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal.2005. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif: dari pengertian sampai Penulisan Laporan*. Padang: Unand
- Andrianus Pito. Toni, Efriza, Fshah, dan Kemal. 2006. *Mengenal Teori-Teori Politik*. Bandung: Nuansa
- Anugerah, Astrid. 2009. *Keterwakilan Perempuan dan Politik*. Jakarta: Pancuran Alam
- Amal, Ichlasul. 1996. *Teori-Teori Partai Politik Mutakhir*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Emilia,Ranny.2003. *Gender dan Politik dalam Paradigma Keragaman*. Jurnal Analisa Politik. Volume
- Ismail, Rio, dkk. 2004. *Suara Mayoritas yang Samar: Studi Tentang Respon Partai Politik Terhadap Kepentingan Perempuan Menjelang Pemilu 2004*. Jakarta: Solidaritas perempuan
- Johnson, Doyle Paul. 1986. *Teori Sosiologi Kalsik Dan Modern*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Kusumaatmadja, Sarwono. 2007. *Politik Dan Perempuan*. Depok. PT. Koekoesan.
- Murniati A. Nunuk Prasetyo, 2004. *Getar Gender, Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi dan HAM*, Magelang: Indonesiaterra
- Maleong, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Poerwadarmita, WJS (1985:635). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Sanit, Arbi.1985. *Perwakilan Politik Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali
- Soejipto, Ani Widayani. 2005. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Subakti, Ramelan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada

Schroder, Peter. 2008. *Strategi Politik Edisi Revisi untuk Pemilu 2009*. Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit.

A.Putri, Indah. 2004. "Pemberdayaan Perempuan dalam Politik (Studi Kasus: Partai Golkar di Sumatera Barat)". *Skripsi* tidak diterbitkan. Padang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

Susilawati, Yuni. 2009. Keterwakilan Politik Perempuan di DPRD Kota Padang Periode 2009-2014 (Studi Keterwakilan Politik Perempuan dari Partai Politik Pemenang Pemilu Legislatif di DPRD Kota Padang Periode 2009-2014 Pasca Pembatalan Pasal 214 UU Pemilu No 10 Tahun 2008). *Skripsi Tidak Diterbitkan*. Padang: Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Andalas.

Effi, Rahmaida. 2003. *Keterwakilan Perempuan di DPRD provinsi Sumatera Barat*. *Skripsi* ini tidak diterbitkan. Padang. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

Undang-undang No. 10 Tahun 2008 Tentang *Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*

Undang-undang Pemilu No. 12 Tahun 2003

Undang-undang Partai Politik No. 2 Tahun 2008

Hasil Munas VIII Partai Politik tahun 2009, *Suara Golkar Suara Rakyat*, Sekretariat Jendral Dewan pimpinan pusat partai Golkar tahun 2009

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>

http://www.khofifahindarparawangsa.com/nsroom/artikel/hambatan_terhadap_partisipasi_politik_perempuan_diIndonesia.pdf

<http://psychemate.blogspot.com/2007/12/teori-gender.htm>

http://www.wikipedia.com/nsroom/artikel/partisipasi_politik



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Febrina Etvil

BP : 06193038

Tempat/tanggal lahir : Lima Kaum/ 5 Februari 1988

Agama : Islam

Alamat Sekarang : Jl. Pepaya I No. 15 A, Anduring, Padang

Alamat Tetap : Jorong Dusun Tuo, Nagari Limo Kaum,
Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar

Email : my_chindai@yahoo.co.id

Riwayat Pendidikan

SD : SDN 27 Lima Kaum

SLTP : SLTP N 3 Batusangkar

SMA : SMA Negeri 1 Batusangakar



PANDUAN WAWANCARA PENELITIAN

Dengan hormat, dalam rangka penulisan skripsi di jurusan ilmu politik, sebagai syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan maka saya mohon bantuan kepada bapak/ ibu untuk meluangkan waktu untuk melakukan wawancara dengan saya. Setiap jawaban yang bapak/ibu berikan merupakan bantuan yang sangat berharga bagi saya. Atas bantuan yang bapak/ ibu berikan saya ucapkan terima kasih.

PERAN PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PEMILU LEGISLATIF 2004 DAN 2009 (STUDI PADA PARTAI GOLKAR DAN PARTAI DEMOKRAT)

I. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran partai politik dalam usaha meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Tanah datar
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis hambatan dan kendala yang dihadapi aktivis perempuan partai di legislatif Kabupaten Tanah Datar

II. Peran Partai dalam usaha Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Tanah Datar

1. Bagaimana pandangan partai terhadap keterwakilan perempuan di parlemen dan bagaimana partai menanggapi perwakilan perempuan di Parlemen?
2. Apa yang mendasari partai untuk berperan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, selain itu apakah partai melaksanakan peran sesuai dengan fungsi-fungsi partai yang tercantum dalam UU?
3. Apa saja bentuk-bentuk peran partai dalam meningkatkan keterwakilan perempuan?
4. Selain bidang kewanitaan apakah terbuka kesempatan bagi aktivis perempuan partai untuk duduk di bidang lain dalam struktur organisasi?
5. Bagaimana proses pembinaan dan rekrutmen aktivis perempuan partai yang dilakukan partai?

6. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap adanya aktivitas perempuan dalam partai?

III. Hambatan dan Kendala yang dihadapi anggota legislatif perempuan terhadap keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif kabupaten Tanah Datar

1. Bagaimana cara Ibu menjaga keseimbangan antara peran Ibu dalam keluarga dengan aktivitas partai ?, apakah keluarga memberi dukungan penuh terhadap aktivitas ibu dalam partai dan lembaga legislatif?
2. Dengan terpilihnya ibu sebagai anggota legislatif , langkah-langkah apa saja yang ibu lakukan untuk memperlihatkan eksistensi Ibu di lembaga legislatif, khususnya dalam memperjuangkan kebutuhan kaum wanita?
3. Menurut Ibu bagaimana peran partai dalam mendukung keterwakilan perempuan di lembaga legislatif?
4. Apa saja kendala dan hambatan yang ibu hadapi dalam melakukan aktivitas politik di parlemen?
5. Apa harapan ibu terhadap peran partai politik dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif?
6. Adakah harapan- harapan tertentu dari ibu terhadap peran serta perempuan dalam dunia politik?



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

No. : 544/SP.X.FISIP. 2010

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa

A.N.: FEBRINA ETNIL

BP. 06193038

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS

Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah menyelesaikan program studinya diwajibkan menyusun/menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas :

- a. Nama : FEBRINA ETNIL
- b. No.BP. : 06193038
- c. Jurusan : ILMU POLITIK

Dalam menyelesaikan program studinya akan menyusun/menulis skripsi.

- 2. Bahwa untuk kelancaran penyusunan/penulisan skripsi mahasiswa tersebut perlu adanya bimbingan dan pembinaan yang intensif.
- 3. Berdasarkan sub a, b dan c, dipandang perlu menunjuk/mengangkat Dosen Pembimbing Skripsi dimaksud dengan surat keputusan.

- Mengingat** :
- 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003;
 - 2. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 1999;
 - 3. Keputusan Mendikbud RI No.196/0/1995;
 - 4. Keputusan Mendikbud RI No.155/U/1998;
 - 5. Keputusan Dirjen Dikti No.38/DIKTI/Kep-2000;
 - 6. Keputusan Rektor Univ Andalas No.1015/III/Unand-2004;
 - 7. Keputusan Rektor Univ Andalas No.1090/XIV/AJU/-2006;
 - 8. Surat Pengesahan DIPA Unand No. 0191.0/023-04/III/2008 Tgl. 31 Desember 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama : Menunjuk/mengangkat staf pengajar tersebut dibawah ini :

Nama Dosen	Jabatan	Honor
Dr. Sri Zulchairiyah, MS	Pembimbing I	Rp. 85.000,-
Tengku Rika Valentina, S.IP, MA	Pembimbing II	Rp. 65.000,-

Penyusunan/penulisan skripsi mahasiswa FISIP Universitas Andalas.

- a. Nama : FEBRINA ETNIL
- b. No.BP. : 06193038
- c. Jurusan : ILMU POLITIK
- d. Judul Skripsi : HAMBATAN PEROLEHAN SUARA OLEH CALEG PEREMPUAN

- Kedua : Diharapkan kepada Dosen Pembimbing dapat melakukan bimbingan dan pembinaan dalam menyusun/penulisan Skripsi, mahasiswa ini dengan sebaik-baiknya
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Padang.
Pada Tanggal : 15 Februari, 2010

Tembusan :

- 1. Yth.Rektor Universitas Andalas
- 2. Ketua Jurusan di lingkungan FISIP Univ. Andalas
- 3. Subag. Keuangan FISIP Unand di Padang



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
No. : 544/SP.X.FISIP. 2010

Tentang

Tim Penguji Seminar Proposal

A.N.: FEBRINA ETNIL BP. 06193038

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, diperkenankan untuk mengikuti seminar proposal.
 - b. Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas :
N a m a : FEBRINA ETNIL
No.BP. : 06193038
Jurusan : ILMU POLITIK
Judul : Peran Partai dan Perempuan dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Legislatif 2009 di Kab. Tanah Datar

Telah memenuhi syarat untuk mengikuti, Seminar Proposal.

- c. Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuk/diangkat Tim Penguji Seminar Proposal dimaksud dengan surat keputusan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980;
 3. Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1990;
 4. Keputusan Mendikbud RI No.0124/0/1993;
 5. Keputusan Mendikbud RI No.0202/0/1993;
 6. Keputusan Rektor Univ Andalas No.1033/XIV/UI-1999;
 7. Keputusan Rektor Univ Andalas No.694/VIII/A/UI-2000;
 8. Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas tahun 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk/mengangkat staf pengajar tersebut dibawah ini :

No	Nama Dosen	Jabatan	Honor
1.	Drs. Tamrin, M.Si	Ketua	Rp. 25.000,-
2.	Drs. Bakaruddin Rosyidi, MS	Sekretaris	Rp. 20.000,-
3.	Doni Hendrik, S.IP, M.Soc, SC	Anggota	Rp. 15.000,-
4.	Dr. Sri Zulchainyah, MA	Anggota	Rp. 15.000,-
5.	Tengku Rika Valentina, S.IP, MA	Anggota	Rp. 15.000,-

Sebagai Tim Penguji Seminar Proposal mahasiswa FISIP Universitas Andalas.

N a m a : FEBRINA ETNIL

No.BP. : 06193038

Jurusan : ILMU POLITIK

- Kedua : Seminar Proposal dilaksanakan pada :
Hari / Tanggal : Jumat / 12 Nopember 2011
J a m : 14:00
Tempat : Ruang Sidang Jurusan

- Ketiga : Tim Penguji agar melaporkan dan bertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada jurusan / pimpinan fakultas.

- Keempat : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Padang.

: 08 Nopember 2010

Tembusan :

1. Yth.Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Jurusan di lingkungan FISIP Univ. Andalas
3. Subag. Keuangan FISIP Unand di Padang



SK Pengganti / Baru



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Kampus Limau Manis PADANG
Telp. (0751) 71266 Fax. 71266

Nomor : 639 /J.16.09/PP-2009
Lamp : -
Hal : Survai Awal

Kepada :

di

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa kami menugaskan mahasiswa FISIP Universitas Andalas :

No.BP. : 06193038
N a m a : FEBRINA ETNIL
Jurusan / Program Studi : ILMU POLITIK
Alamat : Anduring Padang

Dengan Judul : Hambatan perolehan suara caleg perempuan pada pemilu 2009 di Kabupaten Tanah Datar

Lokasi : Kabupaten Tanah Datar

Untuk melaksanakan penelitian / Survai Awal / Studi Pustaka / Praktek Lapangan dalam rangka persiapan penulisan skripsi

Oleh karena itu kami mohon bantuan Saudara agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Saudara agar dapat memberikan izin/rekomendasi seperlunya mengenai tugas tersebut diatas.

Atas segala bantuan dan perhatian Saudara, sebelumnya kami aturkan terima kasih.

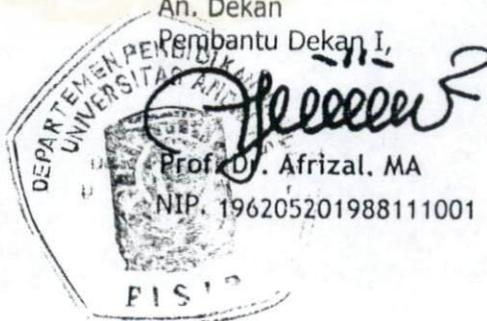
Padang, 23 Desember 2009

An. Dekan
Pembantu Dekan I,

Prof. D. Afrizal, MA
NIP. 196205201988111001

Tembusan:

1. Rektor Univ.Andalás
2. Ketua Jurusan
3. Dosen Pembimbing
4. Mahasiswa yang bersangkutan





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(KESBANGPOL DAN LINMAS)

Jln. Suprpto No. 03 Telp. (0752) 574647 Batusangkar 27219

SURAT KETERANGAN/REKOMENDASI

Nomor : 070/ 53 /KBPLM/2010

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Nomor : 639/j.16.09/PP/2009, tanggal 23 Desember 2009 perihal Survei Awal, setelah dipelajari dengan ini kami atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyatakan tidak keberatan atas maksud Pengambilan Data dimaksud dengan lokasi di Kabupaten Tanah Datar yang akan dilakukan oleh :

Nama : FEBRINA ETVIL
Tempat/Tgl. Lahir : Lima Kaum/ 5 Februari 1988
Pekerjaan : Mahasiswi FISIP Unand
Alamat : Jorong Dusun Tuo, Nagari Lima Kaum
Kartu Identitas : BP. 06193038
Maksud dan Obyek : Penelitian untuk penulisan proposal
Judul : " HAMBATAN PEROLEHAN SUARA CALEG PEREMPUAN PADA PEMILU 2009 DI KABUPATEN TANAH DATAR "
Lokasi : KPUD Tanah Datar
W a k t u : 22 Januari s.d 22 Pebruari 2010
Anggota : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengambilan Data tidak boleh menyimpang dari maksud dan obyek sebagaimana tersebut di atas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Pengambilan Data yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Aparatur Pemerintah setempat dan melaporkan kembali waktu akan berangkat.
3. Dalam melaksanakan Pengambilan Data agar dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat - istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Surat Keterangan/Rekomendasi ini akan **DICABUT** kembali.
6. Surat Keterangan/Rekomendasi ini diberikan/berlaku mulai tanggal 22 Januari s.d 22 Pebruari 2010.
7. Melaporkan hasil Pengambilan Data kepada Bupati Tanah Datar Cq. Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Tanah Datar.

Demikianlah surat keterangan/ rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 22 Januari 2010
An. KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS
KABUPATEN TANAH DATAR
SEKRETARIS,



Drs. ROTZAMI, M.Si

NIP. 19680606 198903 1 008

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Tanah Datar (sebagai laporan).
2. Dandim 0307 Tanah Datar di Batusangkar.
3. Kapolres Tanah Datar di Batusangkar.
4. Ketua KPUD Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
5. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas di Padang.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Kampus Limau Manis, Padang, Telp/Fax. (0751) 71266

Nomor : *DA/*J.16.09/PP- 2010
Lamp : -
Hal : Penelitian/Survei/
Studi Pustaka / Praktek Lapangan

Kepada : Yth, Sdr,.....

di

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa kami menugaskan mahasiswa FISIP Universitas Andalas :

No.BP. : 06193038
N a m a : FEBRINA ETNIL
Jurusan : ILMU POLITIK
Program Studi : S 1
Alamat : Jl. Pepaya I No.15 A Anduring Padang

Untuk melaksanakan penelitian / Survei Awal / Studi Pustaka / Praktek Lapangan :

Dengan Judul : Peran Partai dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Legislatif 2004-2009 di Kab. Tanah Datar. Studi Kasus: Pada Partai Golkar dan Partai Demokrat

Waktu : 2 Bln
Tempat : Kab. Tanah Datar

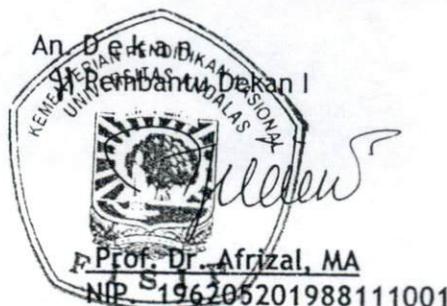
Dalam Rangka : Penulisan Skripsi

Oleh karena itu kami mohon bantuan Saudara agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

Disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Saudara agar dapat memberikan izin/rekomendasi seperlunya mengenai tugas tersebut diatas.

Atas segala bantuan dan perhatian Saudara, sebelumnya kami aturkan terima kasih.

Padang, 10 Desember, 2010



Tembusan:

1. Rektor Univ.Andalas
2. Ketua Jurusan
3. Dosen Pembimbing
4. Mahasiswa yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(KESBANGPOL DAN LINMAS)

Jln. Suprpto No. 03 Telp. (0752) 574647 Batusangkar 27219

SURAT KETERANGAN/REKOMENDASI

Nomor : 070/SIS /KBPLM/2010

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial DAN Ilmu Politik Unand Padang Nomor : 215/IS.16.09/PP-2010 tanggal 10 Desember 2010 perihal Izin Penelitian, setelah dipelajari dengan ini kami atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar menyatakan tidak keberatan atas maksud dimaksud dengan lokasi di Kabupaten Tanah Datar yang akan dilakukan oleh :

Nama : FEBRINA ETVIL
 Tempat/Tgl. Lahir : Lima Kaum, 05 Februari 1988
 Pekerjaan : Mahasiswa FIS
 Alamat : Jorong Dusun Tuo, Nagari Lima Kaum, Kecamatan Lima kaum
 Kartu Identitas : NIM. 06 193 083
 Maksud dan Obyek : Izin Penelitian
 Judul : PERAN PARTAI DALAM MENINGKATKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PEMILU LEGISLATIF 2004 DAN 2009 DI KABUPATEN TANAH DATAR
 Lokasi : DPD Partai Golkar dan DPD Partai Demokrat Kabupaten Tanah Datar
 Waktu : 14 Desember 2010 s.d 13 Februari 2011
 Anggoia : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penelitian tidak boleh menyimpang dari maksud dan obyek sebagaimana tersebut di atas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Pemerintah setempat dan melaporkan kembali waktu akan berangkat.
3. Dalam melaksanakan penelitian agar dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat - istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Surat Keterangan/Rekomendasi ini akan **DICABUT** kembali.
6. Surat Keterangan/Rekomendasi ini diberikan/berlaku mulai tanggal 14 Desember 2010 s.d 13 Februari 2011
7. Melaporkan hasil Penelitian kepada Bupati Tanah Datar Cq. Badan Keshangpol dan Linmas Kabupaten Tanah Datar.

Demikianlah surat keterangan/ rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 14 Desember 2010
 An. KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS
 KABUPATEN TANAH DATAR
 SEKRETARIS,



Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Tanah Datar (sebagai laporan)
2. Dandim 0307 Tanah Datar di Batusangkar
3. Kapolres Tanah Datar di Batusangkar
4. Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Unand Padang di Padang
5. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar
6. Ketua DPD Partai Demokrat Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
PROPINSI SUMATERA BARAT**

KEPUTUSAN
DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI GOLONGAN KARYA PROPINSI SUMATERA BARAT
Nomor : KEP - 016/4/GKSB/3/2010

TENTANG
UNIVERSITAS ANDALAS
PENGESAHAN KOMPOSISI DAN PERSONALIA
DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATEN TANAH DATAR
PERIODE 2009 - 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA
PROPINSI SUMATERA BARAT

Menimbang

- a. bahwa Musyawarah Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Tanah Datar yang diselenggarakan pada tanggal 9 Maret 2010, telah berhasil memilih dan menetapkan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Tanah Datar untuk masa bakti 2009 - 2015;
- b. bahwa Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Tanah Datar, sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai GOLKAR disahkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi Sumatera Barat;
- c. bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan Keputusan DPD Partai GOLKAR Provinsi Sumatera Barat tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Tanah Datar;

Mengingat

1. Keputusan MUNAS VIII Partai GOLKAR Nomor : VI/MUNAS-VIII/GOLKAR/2009 tanggal 8 Oktober 2009 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai GOLKAR;
2. Keputusan MUNAS VIII Partai GOLKAR Nomor : VII/MUNAS-VIII/GOLKAR/2009 tanggal 8 Oktober 2009 tentang Program Umum Partai GOLKAR;
3. Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : KEP-35/DPP/GOLKAR/X/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Komposisi dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Propinsi Sumatera Barat Masa Bakti 2009 - 2015;
4. Petunjuk Pelaksanaan DPP Partai GOLKAR Nomor : JUKLAK - 1 / DPP/GOLKAR/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang Penyelenggaraan MUSDA Provinsi, Musyawarah Daerah Kabupaten / Kota, Musyawarah Kecamatan dan Musyawarah Desa / Kelurahan atau sebutan lain Partai GOLKAR se - Indonesia;

Memperhatikan

- : Surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Tanah Datar Nomor : 45/DPD-PGK/III/TD-2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Penyampaian Hasil MUSDA.